



Jaringan Gusdurian

Genealogi Gerakan Sosial Islam

Dr. H. Nasrudin, M.Ag.
Dr. H. Sudiro, M.M.

Jaringan Gusdurian

Genealogi Gerakan Sosial Islam

Dr. H. Nasrudin, M.Ag.

Dr. H. Sudiro, M.M.



CV. Pustaka Ilmu Group

Jaringan Gusdurian

Genealogi Gerakan Sosial Islam

Penulis:

Dr. H. Nasrudin, M.Ag.

Dr. H. Sudiro, M.M.

Copyright © Pustaka Ilmu, 2025

viii+96 halaman; 14,5x21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-509-307-9

Penulis : **Dr. H. Nasrudin, M.Ag.**

Dr. H. Sudiro, M.M.

Editor : Wahyu Heru Pamungkas, S.Ag., M.S.I.

Desain Cover : Nur Afandi

Layout : Tim Pustaka Ilmu Group

Penerbit Pustaka Ilmu

Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan WhatsApp: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Januari 2025

Marketing:

Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan WhatsApp: 0815728053639

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit
Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillah, Penyusun memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada penulis, diantaranya adalah selesainya penulisan buku dengan judul “*Jaringan Gusdurian: Genealogi Gerakan Sosial Islam*” Sejak proses penulisan sampai terbit berbagai pihak telah berkenan memberikan kemudahan dan bantuannya. Untuk itu kepada semua pihak yang telah membantu proses terlahirnya buku ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari akan kekurangan isi buku ini, karenanya saran dan koreksi sangat diharapkan. Semoga buku yang sederhana ini dapat memberi manfaat bagi kita semua khususnya bagi pemerhati bidang sosial.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
GERAKAN SOSIAL.....	9
A. Pengertian Gerakan Sosial	9
B. Teori Gerakan Sosial.....	15
C. Gerakan Sosial Keagamaan.....	35
D. Gerakan keagamaan dan Perubahan Sosial.....	52
BAB III	
Jaringan Gusdurian	63
A. Gerakan Sosial-Kultural Non Politis.....	63
B. Gerakan Gusdurian Menjawab Peluang Politik Pasca Reformasi.....	75

C. Jaringan Gusdurian dan Mobilisasi Sumber Daya	80
D. Membingkai Gagasan Gus Dur sebagai Spirit Gerakan	83
BAB IV	
PENUTUP.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

PENDAHULUAN

Gerakan-gerakan sosial yang terinspirasi dan terpengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam dalam era reformasi di Indonesia menjadi fenomena yang cukup massif. Gerakan sosial yang berbasis nilai-ajaran Islam inipun selanjutnya mendorong terjadinya arah dan semangat baru dalam perubahan sosial masyarakat. Banyak tokoh-tokoh nasional yang mempunyai andil besar bagi lahir dan berkembangnya gerakan sosial tersebut, diantaranya adalah Abdurrohman Wahid yang dikenal dengan sebutan Gus Dur yang sudah menyuarakannya sejak tahun 1980-an.

Sejalan dengan keputusan Nahdlatul Ulama (NU) kembali pada khittah 1926, kepemimpinan Abdurahaman

Wahid sejak tahun 1984 telah membuka lembaran baru sejarah NU untuk fokus pada aspek sosial keagamaan. Gus Dur secara bertahap mulai menampilkan NU dengan identitas barunya sebagai organisasi dengan pandangan kritis transformatif, sebuah cara pandang yang bisa dikatakan masih langka di Indonesia waktu itu. Gus Dur berhasil menyesuaikan posisi NU dengan menarik NU dari kegiatan politik formal dan keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disamping itu Gusdur juga berhasil menyesuaikan teologi, fikih, dan tasawuf dalam Ahlus-Sunnah wal-Jamaah yang menekankan pada jami'ah diniyah-nya dengan mengambil langkah-langkah untuk membuat kepercayaan teologinya sebagai landasan perkembangan masyarakatnya. (Hikam, 1996:234)

Langkah perjuangan Gus Dur tersebut pada gilirannya menginspirasi perubahan wacana keagamaan sekaligus secara praksis melahirkan gerakan sosial masyarakat terutama dalam internal NU. Apresiasi Gus Dur pada pemikiran baru telah mendorong beberapa kalangan untuk menggeluti kajian kritis yang mendobrak kemapanan. Dengan kepemimpinannya Gus Dur memang telah membawa pemikiran keagamaan NU ke arah yang lebih dinamis, progresif, dan transformatif jika dibandingkan

dengan organisasi keagamaan lainnya. (Rumadi, 2007:6 dan Efendi, 2010:9).

Usaha Gus Dur ini ternyata cukup luas pengaruhnya bahkan menginspirasi kalangan masyarakat terutama kalangan muda untuk melakukan aktivitas intelektual yang cukup intensif dengan wacana yang beragam. Disamping itu mereka yang terbawa oleh arus pemikiran Gusdur juga membangun aliansi internal untuk berkomunikasi, membuat jejaring, dan berdialog di antara mereka. Tidak sedikit aktivis muda yang kemudian mendirikan lembaga sosial, LSM, dan lainnya sebagai media gerakan sosial yang dapat mendorong perubahan sosial keagamaan di Indonesia, termasuk juga mereka yang terjaring dalam komunitas Gusdurian.

Gusdurian merupakan sebutan untuk para murid, pengagum, dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Para gusdurian mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur sesuai dengan konteks tantangan zaman.

Jaringan gusdurian adalah arena sinergi bagi para gusdurian di ruang kultural dan non politik praktis. Di dalam jaringan gusdurian tergabung individu, komunitas/forum lokal, dan organisasi yang merasa terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran, dan perjuangan Gus Dur. Jaringan gusdurian yang terdapat di beberapa kota di Indonesia hingga di luar negeri memfokuskan sinergi kerja non politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah ditekuni Gus Dur yang meliputi 4 dimensi besar yaitu Islam dan Keimanan, Kultural, Negara, dan Kemanusiaan(www.gusdurian.net)

Sebagaimana Gus Dur yang mendasarkan perjuangannya kepada nilai-nilai luhur, jaringan gusdurian tidak membatasi isu yang dikelola, sepanjang terkait dengan 9 nilai Gus Dur yakni Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, serta Kesederhanaan, Sikap Ksatria, dan Kearifan Tradisi. Saat ini jaringan gusdurian berkonsentrasi pada isu-isu kebangsaan, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Munculnya komunitas gusdurian hingga ke tingkat local/daerah banyak dimotori oleh gusdurian generasi muda (angkatan 2000an), yang bersemangat untuk berkumpul mendalami dan mengambil inspirasi dari teladan Gus Dur. Dalam menjalankan amanah jaringan, Gusdurian memfokuskan diri pada program-

program penyebaran gagasan, memfasilitasi konsolidasi jaringan, memberikan dukungan pada upaya (program) lokal, program kaderisasi, dan peningkatan kapasitas jaringan. Selain itu, Gusdurian juga menjadi koordinator untuk program-program bersama lintas komunitas gusdurian, serta menginisiasi kelas-kelas khusus terkait jaringan. Beberapa di antaranya adalah kelas pemikiran Gus Dur, Forum kajian dan diskusi, Kampanye Anti Korupsi, Pelatihan entrepreneurship, Forum budaya. Workshop Social Media hingga Koperasi Jaringan Gusdurian. (www.gusdurian.net)

Gusdurian pada gilirannya menjadi basis sosial intelektual terutama di kalangan muda (NU), disamping pesantren dan LSM seperti LkiS dan yang lainnya. Tradisi intelektual Islam bertambah dengan adanya komunitas Gusdurian dan sekaligus menjadi basis sosial intelektual baru di kalangan anak muda (Shodiq,2000:53). Gusdurian merupakan salah satu wadah atau rumah baru anak muda untuk mengembangkan gagasan keislaman kritis dalam bidang sosial keagamaan. Keberadaannya memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual anak muda bahkan bukan hanya darikalanganNU. Gusdurian menjadi wadah gerakan sosial dan menjadi

motor yang menggerakkan dinamika pemikiran sosial keagamaan masyarakat di era reformasi. Bertepatan dengan momentum reformasi tahun 1998 Gusdurian menjadi salah satu mata rantai pembaruan intelektualisme Islam di Indonesia, terutama dari kalangan NU. Melalui semangat memahami, mengkaji dan meneladani Gus Dur, komunitas Gus durian melakukan gerakan pembaruan pemikiran keislaman di tengah dunia yang berubah. Kehadirannya mempunyai makna besar terhadap proses perubahan sosial dan keagamaan di Indonesia yang mendorong perubahan sosial pada terbentuknya civil society di Indonesia yaitu masyarakat sipil yang kuat dan bisa menjadi penyangga sekaligus jembatan penghubung antara masyarakat dan negara.

Selama kurang lebih 32 tahun Indonesia berada di bawah rezim Soeharto yang represif, membungkam kebebasan sipil dan politik, serta mengedepankan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan persoalan, menjadi catatan penting bagi terbentuknya *civil society* di Indonesia pada era reformasi. Dalam hal ini, Gusdurian sebagai gerakan sosial Islam mampu mendorong kehidupan politik ke arah yang demokratis pasca hegemoni negara era Orde Baru.

Gagasan keislaman kritis-transformatif dan keberpihakan sebagai perspektif gerakan sosial sebagaimana yang diusung oleh Gusdurian menjadi penting untuk dikaji lebih analitis dengan pendekatan dan teori tertentu. Mengungkapkan gerakan sosial mereka serta relevansinya pada perubahan sosial dimaksudkan untuk melihat perubahan, pergeseran, dan transformasi strategi serta pola gerakan sosial yang muncul pada masa reformasi. Dengan konteks sosial dan situasi politik yang dihadapi, perlu ada model dan pendekatan yang berbeda pula dalam merumuskan gerakan sosial model gerakan sosial jaringan gusdurian. Hal ini menjadi menarik ketika model gerakan sosial mereka dihadapkan pada menjamurnya LSM, tarekat, dan organ gerakan sosial Islam lainnya dalam merumuskan agenda perubahan. Hal ini tidak lepas dari kenyataannya bahwa era reformasi telah menjadi jembatan lahirnya gerakan-gerakan sosial Islam dalam bentuk/model gerakan yang beragam sesuai dengan madzhab pemikirannya mulai dari yang kritis tetapi inklusif hingga yang eksklusif-intoleran atau dari yang liberal hingga radikal.

Gerakan sosial Gusdurian serta relevansinya untuk transformasi sosial keagamaan di Indonesia dimana semangat gerakannya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat

berdasarkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh Gus Dur. Nilai-nilai kemanusiaan universal, demokrasi, penguatan hak-hak kaum minoritas, keadilan, kesetaraan dan perdamaian manusia merupakan wacana sosial keagamaan yang menjadi kekuatan utama dari gerakan sosial Islam Gusdurian.

GERAKAN SOSIAL

A. Pengertian Gerakan Sosial

Memahami munculnya fenomena gerakan sosial masyarakat Islam yang teraktualisasi dalam berbagai gerakan yang berbasis pada organisasi-organisasi Islam, sebenarnya dapat ditarik pada teori-teori tentang gerakan sosial. Meskipun hubungan antara nilai, doktrin dengan aktifitas dan tindakan social masyarakat Islam - sebagaimana dalam teori-teori sosial- menunjukkan adanya nilai-nilai agama sebagai pendorong tindakan sosial, namun perspektif tersebut belum bisa menjelaskan bagaimana dinamika gerakan itu sendiri. Hal itu karena munculnya organisasi seperti mereka yang terjaring dalam jaringan gusdurian tentu menjadikan aktifitas-aktifitas mereka bukan bersifat

individual tetapi kolektif. Untuk itu diperlukan juga teori-teori tentang gerakan sosial (*social movement*) sebagaimana dalam perkembangannya sekarang yang menekankan kajiannya pada gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara terorganisir.

Secara umum, gerakan sosial merupakan upaya sadar, kolektif, dan terorganisir untuk mendorong atau menolak perubahan dalam tatanan sosial. Hal ini mengandung arti bahwa kriteria utama dari gerakan sosial adalah bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan secara fundamental dalam masyarakat. Sebagian besar perilaku kolektif terorganisasi, baik pemimpin, pengikut, maupun proses gerakannya dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bergerak untuk menerima atau menolak nilai/norma dengan jalan terorganisir (Locher, 2003:233). Menurut Giddens, sebagaimana disebutkan dalam Situmorang (2007:3) bahwa gerakan sosial adalah gerakan untuk mencapai suatu kepentingan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa Gerakan sosial memiliki beberapa karakter : pertama, gerakan sosial dilakukan oleh masyarakat, dan bukan negara; kedua, gerakan sosial dilakukan secara sengaja dan kolektif sifatnya; ketiga,

gerakan sosial diarahkan untuk mempengaruhi perubahan struktur sosial yang ada; keempat, gerakan sosial umumnya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dengan struktur sosial yang ada, dan ingin menggantinya dengan sistem baru yang dianggapnya lebih baik; dan kelima, gerakan sosial bisa berorientasi pada perubahan dan juga bisa pada anti perubahan (Situmorang, 2007:3).

Gerakan sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat pada umumnya bisa disebut sebagai suatu gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Dari hal tersebut, terlihat bahwa tuntutan perubahan tersebut muncul karena kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak lagi sesuai dengan konteks masyarakat yang ada saat ini atau bisa saja kebijakan yang ada bertentangan dengan kehendak sebagian besar masyarakat.

Sebelumnya, kita mengenal ada dua macam gerakan sosial, yaitu *old social movement* dan *new social movement*. *Old social movement* merupakan gerakan yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan sisi materi dan biasanya terkait dengan ketimpangan ekonomi dan atau kelas pada

suatu kelompok, seperti kelompok petani atau buruh (Triwibowo, 2006). *Old social movement* lebih mengarah pada masalah-masalah ketenagakerjaan, keanggotaan massa yang memiliki kelas-kelas dan anti-kolonialisme. Dalam perspektif ini, gerakan lahir karena dukungan dari mereka yang terisolasi di masyarakat dan cerminan dari perjuangan kelas di sekitar proses produksi sehingga sering terkait dengan kasus yang menimpa para buruh.

Di lain sisi, *new social movement* atau gerakan sosial baru merupakan tipe gerakan sosial yang memiliki tampilan karakter yang baru atau unik dimana gerakan ini lebih berpusat pada tujuan-tujuan non material. Gerakan ini menekankan pada perubahan-perubahan dalam gaya hidup atau kebudayaan daripada mendorong perubahan-perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan ekonomi (Nash, 2005). Dalam kajian ini, konsep Gerakan Sosial Baru akan digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi pada gerakan Gusdurian, baik itu dari proses pembentukan maupun strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan.

Adapun yang dimaksud dengan gerakan sosial Islam yang menjadi fokus dalam hal ini adalah gerakan yang

menempatkan ajaran/nilai-nilai Islam pada pengertian konstruksi realitas sosial sehingga dapat membawa pada kesadaran kritis terhadap realitas sosial sebagai bentuk dialektika agama dengan budaya yang mendorong kearah perubahan sosial. Pemahaman demikian tentu tidak hanya sebatas melihat sisi normatif-dogmatis saja, tetapi tarekat menjadi energi moral bagi perubahan sosial. Untuk mewujudkan transformasi agama pada kehidupan diperlukan transformasi lembaga sosial. Gusdurian merupakan komunitas yang berbasis agama sebagai wujud praksis gerakan keagamaan. Segala aktivitas social jaringan gusdurian sebenarnya merupakan upaya eksternalisasi atau pembumian nilai-nilai dan pesan keagamaan secara empiris dan nyata di tengah masyarakat.

Gerakan sosial atau *Social movements* menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Perkembangannya yang begitu cepat, terutama setelah mulai bermunculannya berbagai gerakan pada tahun 1960-an yang mengusung berbagai tujuan, menjadikan topik ini cukup menarik perhatian (Porta dan Diani, 2006:1). Hal ini mengakibatkan hadirnya beragam perspektif yang berkembang dalam melihat kemunculan sebuah gerakan sosial.

Dalam satu dekade terakhir ini, perspektif gerakan sosial didominasi oleh pendekatan *political approach*. Pendekatan ini melihat gerakan sosial dalam kerangka *state-centeredness*, menjadikan negara sebagai target dari gerakan sosial, karena negaralah satu-satunya otoritas (*source of power*) (Armstrong dan Bernstein, 2008:74). Namun, pandangan ini mendapatkan banyak kritikan, terutama sejak mulai berkembangnya apa yang disebut Tilly (1998) sebagai *new social movements*, yaitu gerakan-gerakan yang berbasis pada isu-isu seperti lingkungan, preferensi seksual, dan gender. Gerakan-gerakan tersebut tidak semata-mata menjadikan negara sebagai target, sehingga hadirilah berbagai definisi baru mengenai gerakan sosial. Salah satunya adalah yang dibawakan oleh Snow (2004:11), yang mengatakan:

“...social movements can be thought of as collectivities acting

with some degree of organization and continuity outside of institutional or organizational channels for the pure of challenging or defending extant authority, whether it is institutionally or culturally based, in the group, organization, society, culture, or world order of which they are apart.”

Dari pernyataan itu, Snow mendefinisikan gerakan sosial sebagai gerakan kolektif yang terorganisasi dan

berkelanjutan, yang bertujuan untuk menentang otoritas yang ada, baik secara institusi maupun kultural. Penjelasan Snow menunjukkan bahwa negara bukanlah satu-satunya *source of power and authority*. Gerakan sosial tidak hanya lain dari berbagai insititusi dan *cultural meaning* yang menjadi bagian dari masyarakat.

Para ahli memahami bahwa gerakan sosial merupakan gejala yang begitu kompleks. Pemahaman ini menghantarkan pentingnya pembahasan yang bersifat komprehensif dan integral antara *political opportunity structure* (SKP), *resources mobilization theory*, dan *collective action frames* (McAdam, McCarthy, dan Zald, 1996:7). Ketiga hal tersebut merupakan faktor dari muncul dan berkembangnya suatu gerakan sosial.

B. Teori Gerakan Sosial

1. Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*)

Struktur Kesempatan Politik merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa kondisi struktur politik dalam hal tertentu memiliki pengaruh yang cukup

signifikan terhadap perkembangan suatu gerakan sosial. Jadi, suatu gerakan sosial tergantung pada keadaan Struktur Kesempatan Politik (SKP) itu sendiri. Dalam hal ini, SKP menjadi ruang multidimensi yang mana gerakan sosial dan tindakannya bisa saja dimudahkan (*facilitated*) atau bisa saja direpresi (dihambat), sehingga tak bisa berkembang (*repressed*) (Oliver, 1998). Konsep struktur kesempatan politik juga menjelaskan bahwa munculnya gerakan sosial seringkali dipicu oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur politik sehingga gerakan itu juga biasanya berhubungan dengan pergeseran-pergeseran yang terjadi di dalamnya. SKP merupakan sebuah konsep yang mengungkapkan bahwa perilaku massa secara organis dalam hal tertentu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan suatu gerakan sosial. Dari konsepsi demikian, masyarakat secara organis dapat menghasilkan infrastruktur kelembagaan yang mengatur keseimbangan di antara masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*) dalam sistem politik. (Quintan Wiktorowica, 2012: 42)

Doug McAdam menjelaskan bahwa teori struktur kesempatan politik dapat dipergunakan sebagai variable utama berkaitan dengan dua prinsip variable dependent, yaitu momentum aksi kolektif dan hasil dari aktivitas

sebuah gerakan (Mc Adam, 1996: 29). Salah satu perintis pertama teori kesempatan politik adalah Peter Eisinger. Di dalam artikelnya di jurnal *American Political Science Review* menjelaskan berbagai fenomena kemunculan gerakan social, revolusi, dan gerakan nasionalisme dengan mempergunakan teori kesempatan politik. Ia sendiri terinspirasi dari pandangan Tocqueville yang menyimpulkan jika revolusi terjadi tidak ketika kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi tertutup mengalami keterbukaan dan dipergunakan oleh para penantang untuk melakukan perlawanan.

Dari sini struktur kesempatan politik mencoba menjelaskan munculnya dan berkembangnya gerakan social terjadi karena dalam perubahan struktur politik yang dimaknai sebagai kesempatan. Secara umum hambatan atau kesempatan politik bagi gerakan social dapat dipilah menjadi dua kategori yakni, pola hubungan tertutup dan pola hubungan terbuka. Pola tertutup menghadirkan hambatan gerakan social. Sedangkan Pola terbuka membuka kesempatan dan kemunculan perkembangan bagi suatu gerakan social sebagai bagian dari relasi politik yang kompetitif bagi elit, antara partai politik dan juga antara kelompok kepentingan. Semakin terbukanya kesempatan

politik, maka semakin terbentuknya perkembangan gerakan social. Begitu pun sebaliknya, semakin tertutup kesempatan politik, maka semakin sempit kemunculan perkembangan suatu gerakan social.

Ada dua hal penting yang Kriesi (Abdul Wahib Situmorang, 2013: 36-37) jelaskan berkaitan dengan teori kesempatan politik. *Pertama*, teori kesempatan politik bukan sebuah konsep kaku dan konstan. Teori ini mungkin mengalami perubahan sepanjang masa sebagai hasil control para elite baru di dalam sistem atau tercapainya konsolidasi elite lama. Karena itu, Kriesi menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor struktur kelembagaan formal, informal, dan strategi yang dipergunakan oleh para pelaku perubahan.

Kedua, teori kesempatan politik ini dipergunakan untuk menjelaskan sampai sejauhmana terbukanya kesempatan politik berperan dalam menyuburkan protes-protes menentang ketidakadilan ekologi di Indonesia dengan mempergunakan dimensi-dimensi teori struktur kesempatan politik. Dengan mempergunakan teori ini, perbandingan dapat dilakukan dengan melihat frekuensi dan besaran aksi-aksi kolektif dan gerakan lingkungan hidup pasca reformasi.

Secara umum, hambatan atau kesempatan politik bagi suatu gerakan sosial dapat dipilah ke dalam dua kategori: pola hubungan tertutup dan pola hubungan terbuka. Pola tertutup menciptakan hambatan bagi gerakan sosial, sedangkan pola terbuka membuka kesempatan bagi munculnya gerakan akibat dari politik yang lebih kompetitif antara elite, antara partai politik, dan juga antara kelompok kepentingan. Semakin terbuka iklim politik, semakin memberikan kesempatan untuk muncul dan berkembangnya gerakan sosial; dan sebaliknya, semakin tertutup iklim politik, semakin tertutup kesempatan muncul dan berkembangnya suatu gerakan sosial (Muhtadi, 2011:10).

Mc Adam juga menjelaskan bahwa SKP adalah pola hubungan antara elite politik, antara partai politik, antara kepentingan dan semua ini dengan masyarakat sebagai konstituen. Kemudian dia menghimpun empat dimensi struktur politik, yaitu (1) keterbukaan dan ketertutupan relatif sistem politik; (2) stabilitas atau instabilitas jejaring keterikatan elite; (3) adanya atau tiadanya aliansi-alaiansi elite (4) kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan represi. (Mc Adam & Snow, 1997:154).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa SKP mencoba menjelaskan kemunculan dan perkembangan suatu gerakan sosial terjadi karena dalam perubahan struktur politik yang dimaknai sebagai kesempatan, maka secara umum hambatan atau kesempatan politik bagi gerakan sosial dapat dipilah menjadi dua kategori yakni, pola hubungan tertutup dan pola hubungan terbuka. Pola tertutup menciptakan hambatan bagi gerakan sosial. Sedangkan pola terbuka membuka kesempatan dan kemunculan perkembangan bagi suatu gerakan sosial sebagai bagian dari relasi politik yang kompetitif bagi elit, antara partai politik, dan juga antara kelompok kepentingan. Semakin terbukanya kesempatan politik, maka semakin terbukanya perkembangan gerakan sosial, sebaliknya, semakin tertutup kesempatan politik, akan kesempatan bagi kemunculan perkembangan suatu gerakan sosial.

Hubungan antara struktur kesempatan politik dan kemunculan gerakan sosial tidaklah bersifat linear, tetapi kurvalinear. Suatu gerakan sosial sangat mungkin muncul dalam sistem politik yang menandai adanya pencampuran diantara keterbukaan dan ketertutupan kesempatan SKP. Karena itulah menjadi tidak mudah untuk memberikan batasan derajat keterbukaan dalam SKP yang memunculkan suatu gerakan sosial. (Eisenger, 1973:11)

2. Mobilisasi Sumber Daya (*Resourch Mobilization*)

Meskipun struktur kesempatan politik sangat menentukan munculnya gerakan sosial namun demikian SKP saja tidak cukup untuk mendorong terjadinya aksi kolektif karena harus ditopang pula oleh struktur mobilisasi yang biasanya berakar dalam jaringan-jaringan sosial yang sudah terbangun sebelumnya. Melalui jaringan itu massa dan simpatisan direkrut dan dimobilisasi. Rekrutmen memang menjadi penentu dalam proses pelibatan individu, karena mobilisasi tidak berlangsung dalam ruang hampa. Oleh karena itu salah satu hal yang juga menentukan berkembangnya gerakan sosial yakni, seberapa kuat dan besar sumberdaya internal yang tersedia dan dimobilisasi dengan tepat. Artinya, saat para actor mampu menggerakkan sumberdaya internalnya untuk mempergunakan dukungan faktor eksternal dengan baik, maka perkembangan gerakan social mudah tewujud.

Smelser seperti dikutip dalam Sanderson, juga menjelaskan beragam dalam tindakan dalam gerakan sosial terjadi karena adanya mobilisasi atas dasar sistem keyakinan yang mengalami proses generalisasi yang terdiri dari hal-hal yang bersifat histeria, keinginan, norma dan nilai.

(Sanderson, 1995:60). Perspektif sumber daya mobilisasi menunjukkan beragam tindakan partisipan dalam gerakan sosial. Sumber daya mobilisasi sebagai sejumlah cara kemlompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. (McAdam, McCarthy, dan Zald, 1996:141)

Sejumlah akademisi gerakan social seperti, McAdam, McCarthy, dan Zald mendefinisikan struktur mobilisasi sebagai sebuah sarana kolektif baik dalam lembaga formal dan juga informal. Melalui sarana tersebut, masyarakat memobilisasi sumberdaya yang tersedia dan berbaaur dalam aksi bersama. (Abdul Wahib Situmorang, 2013: 36-37). Dalam teori ini, sumberdaya dan struktur-struktur mobilisasi, seperti organisasi-organisasi gerakan social yang formal, diperlukan guna menciptakan ketidakpuasan kolektif, yang tanpa kepuasan tersebut akan tetap merupakan ketidakpuasan individual. Gerakan-gerakan tidak dilihat sebagai ledakan-ledakan tidak rasional yang ditunjukan untuk meringankan ketegangan psikologis, tetapi lebih sebagai suatu pernyataan yang terorganisir dan yang terstrukturkan melalui mekanisme-mekanisme mobilisasi yang memberikan sumber-sumber daya strategis bagi tindakan kolektif yang berlanjut.

Tilly dikutip oleh Muhtadi lebih lanjut mengatakan bahwa salah satu sumber daya yang paling penting adalah jaringan informal dan formal yang menghubungkan individu-individu dengan organisasi gerakan sosial (Muhtadi, 2000:9). Jaringan yang dijeaskan oleh Klandermans, seperti dikutip kembali oleh Muhtadi sebagai struktur sosial, yaitu serangkaian hubungan sosial yang mendorong dan menghambat perilaku, sikap dan kemungkinan partisipan untuk terlibat dalam suatu gerakan sosial. Klandermans, kemudian menjelaskan pentingnya kepemimpinan dalam menetapkan sumber daya bagi para partisipan suatu gerakan sosial. Sedangkan Maguire, membagi sumber daya kedalam dua kategori, yaitu *tangible* yang mencakup uang, ruang, perlengkapan dan seterusnya. Sedangkan *intangibile* yang mencakup kapasitas kepemimpinan, manajerial, dan pengalaman organisasi, justifikasi ideologis, taktik dan semacamnya. (Muhtadi, 2011:9).

McCarthy dikutip dari Abdul Wahib Situmorang mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. Struktur mobilisasi juga memasukkan serangkaian posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-

hari dalam struktur mobilisasi mikro. Tujuannya adalah mencari lokasi-lokasi di dalam masyarakat untuk dapat dimobilisasi. Dalam konteks ini, unit-unit keluarga, jaringan pertemanan, sosiasi tenaga sukarela, unit-unit tempat bekerja dan elemen-elemen Negara itu sendiri menjadi lokasi-lokasi sosial bagi struktur mobilisasi mikro. (Abdul Wahib Situmorang, 2013: 38)

Mc Adam menambahkan, dengan mempergunakan mekanisme mobilisasi mikro, dia ingin menyatakan bahwa hubungan formal dan informal diantara masyarakat dapat menjadi sumber solidaritas dan memfasilitasi struktur komunikasi ketika mereka mengidentifikasi perbedaan kebijakan pemerintah secara bersama-sama. Dari definisi tersebut, kita dapat menelusuri karakteristik sejarah gerakan sosial dan mampu menentukan dua kategori yang membentuk struktur mobilisasi, yakni, struktur formal dan informal. Dalam struktur mobilisasi informal yang identic dengan gerakan lokal, jaringan kekerabatan dan persaudaraan menjadi dasar bagi rekrutmen gerakan.

Sejalan dengan Adam, Mc Carty selebihnya menjelaskan adanya dua kategori dalam dalam membangun struktur mobilisasi, yaitu struktur formal dan struktur

informal. Dalam struktur mobilisasi informal yang identitik dengan gerakan lokal, jaringan kekerabatan, dan persaudaraan menjadi dasar bagi rekrutmen gerakan. (Mc Carty, 1996:141). Konsep struktur mobilisasi informal kian berkembang menjadi luas ketika dihubungkan dengan mobilisasi gerakan. Situmorang mengutip Woliver yang menekankan pentingnya ingatan komunitas sedangkan Gamson dan Schmeidler mengidentifikasi beberapa faktor jaringan struktur informal seperti, perbedaan dalam sub kultur dan infrastruktur protes serta Mc Adam menjelaskan hubungan formal dan in formal antara masyarakat dapat menjadi sumber soolidaritas dan memfasilitasi struktur komunikasi (Situmorang, 2007:8).

Gerakan sosial dalam pandangan Mc Carty, mempergunakan struktur informal sebagai dasar analisis, belum mampu memetakan struktur informal secara mendalam. Struktur sumber daya mobilisasi merupakan serangkaian posisi sosial dan lokasi dalam masyarakat untuk dapat dimobilisasi dalam suatu gerakan sosial. Kelompok atau organisasi formal memainkan peranan penting dalam membentuk struktur mobilisasi yang kemudian disebut sebagai gerakan sosial. (Mc Carthy, 1996:141).

Konsep struktur mobilisasi informal kian berkembang menjadi luas ketika dihubungkan dengan mobilisasi gerakan. Wolfier, sebagai contoh, menekankan pentingnya faktor ingatan komunitas sedangkan Gamson dan Schmeidler mengidentifikasi beberapa faktor jaringan struktur informal seperti, perbedaan dalam sub kultur dan infrastruktur protes. (Abdul Wahib Situmorang, 2013: 39)

McCarthy mencatat, pelaku perubahan dan para akademisi gerakan sosial yang mempergunakan struktur informal sebagai pisau analisis belumlah mampu memetakan struktur informal secara mendalam. Dengan kata lain, kelompok-kelompok organisasi formal juga memainkan peran penting dalam membentuk struktur mobilisasi. Akademisi mengkategorikan mereka sebagai organisasi gerakan sosial. Akan tetapi, seperti halnya struktur informal, struktur formal juga memiliki bentuk kelembagaan yang beragam.

Selanjutnya, setiap gerakan sosial tentunya membutuhkan sumber daya untuk bisa menjalankan aktivitas kolektifnya. Dalam hal ini, gerakan sosial memiliki beberapa tugas penting seperti memobilisasi pendukung, mengorganisasi sumber daya, yang dalam level yang lebih

jauh berdampak pada munculnya simpati elite-elite dan masyarakat secara umum terhadap cita-cita gerakan. Inilah konsep yang disebut *resources mobilization*. Konsep ini secara mendasar berusaha mengetahui bagaimana sebuah kelompok mengupayakan *resources* yang mereka miliki untuk bisa melakukan perubahan sosial dan tercapainya tujuan kelompok (Edwards dan McCarthy, 2004:118).

Konsep ini berusaha melihat dorongan upaya, baik secara kolektif maupun individual, yang muncul sebagai bagian dari pencapaian tujuan yang dimiliki oleh gerakan sosial. *Resources* sendiri sebenarnya memiliki makna yang begitu luas. *Resources* dapat terdiri dari kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan simpatisan, loyalitas grup. Hanya saja hal itu dimaknai dalam arti yang lebih luas, yakni sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*utility*). Tidak semua hal yang memiliki nilai manfaat bisa disebut sebagai *resources*. Hal itu baru bisa disebut sebagai *resources* ketika individu atau aktor kolektif bisa mengontrolnya dan memanfaatkannya guna tercapainya tujuan gerakan.

Kerangka *resources mobilization* ini menjelaskan dua aspek sekaligus. Pertama, mengenai sumberdaya fisik, non-fisik, ataupun finansial yang dimiliki oleh sebuah gerakan

seperti bangunan, uang, pengetahuan, atau keahlian tertentu. Sumber daya tersebut bisa dikontrol baik secara individual maupun kolektif oleh kelompok. Kedua, mobilisasi merupakan suatu proses tak terpisahkan yang para aktornya berusaha memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan dari gerakan.

3. Pembingkai Aksi Kolektif (*Collective Action Framing*)

Selanjutnya untuk memobilisasi massa, hal penting selanjutnya adalah adanya aktor-aktor gerakan sosial untuk membingkai aksi-aksi yang mereka rencanakan dengan slogan-slogan dan bahasa yang mudah dipahami dan sekaligus dapat menggerakkan sentimen mereka. Di sinilah maka dibutuhkan pentingnya *framing* sebagai seni mengkomunikasikan pesan untuk menggerakkan audien dan mendorong terjadinya dukungan dan partisipasi. Ideologi sebagai sistem kepercayaan, ide, nilai, dan makna, biasanya bekerja untuk mendukung efektivitas *framing* ini. Kondisi struktural yang kondusif tidaklah cukup bagi perkembangan suatu gerakan sosial. Gerakan sosial juga memerlukan apa yang disebut sebagai bagian dari pengemasan ideologi untuk dapat diterima berbagai pihak.

Inilah yang disebut *collective action frames* (pembingkaiian aksi kolektif) yang merupakan bagian dari sebuah proses *framing* dalam gerakan sosial, yakni semacam skema interpretasi yang merupakan sekumpulan *beliefs* and *meanings* dan berorientasi pada aksi yang menginspirasi dan melegitimasi aktivitas sebuah organisasi gerakan sosial. Dalam hal ini, kerangka (*frame*) dibangun untuk memberikan makna dan menginterpretasi kejadian atau kondisi tertentu, yang dimaksudkan untuk memobilisasi potensi pengikut, serta untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak (Benford & Snow, 2000:66).

Teori gerakan sosial ini memperkenalkan perspektif pembingkaiian aksi kolektif untuk menjalankan transformasi mobilisasi sosial ke dalam mobilisasi aktual sebagai upaya meyakinkan kelompok sasaran yang beragama dan luas sehingga mereka terdorong untuk melakukan aktivitas perubahan, Klandermans dalam Muhtadi, menjelaskan mobilisasi aksi berhubungan dengan persoalan psikologi sosial klasik mengenai hubungan antara sikap dan perilaku (Muhtadi, 2011:4). Perspektif pembingkaiian aksi kolektif dapat dijelaskan sebagai konstruksi budaya sebagai sistem kesadaran kolektif yang mengandung makna-makna yang menjadi kekuatan legitimasi dan motivasi lahirnya tindakan-tindakan kolektif.

Sejalan dengan hal di atas, bingkai (*frame*) merupakan skema-skema yang memberikan sebuah bahasa dan sarana kognitif untuk memahami pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa di “dunia luar”. Bagi gerakan sosial, gerakan ini penting untuk menghasilkan dan meyebabkan penafsiran-penafsiran gerakan dan dirancang untuk memobilisasi para peserta dan dukungan. Sebagai agen pemberi makna yang terlibat dalam konstruksi sosial makna, gerakan-gerakan harus mengartikulasikan dan menyebarluaskan kerangka-kerangka pemahaman yang mempengaruhi para calon peserta dan public yang lebih luas untuk merangsang tindakan kolektif. Meskipun gagasan-gagasan atau ideology-ideologi yang ada mungkin mendasari tindakan perseteruan, mereka disusun dan diproses secara sosial melalui konstruksi-konstruksi gramatikal dan lensa-lensa penafsiran yang menghasilkan makna antarsubjek dan mempermudah tujuan-tujuan gerakan. Sedangkan istilah “pemingkaian” (*framing*) digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan makna tersebut. (Quintan Wiktorowica , 2013: 59-61)

Snow dan Banford mencatat, suksesnya gerakan sosial terletak sampai sejauh mana mereka memenangkan pertempuran atas arti. Hal ini berkaitan dengan upaya

para pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembentukan framing atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Lebih lanjut, mereka menekankan dua komponen penting dalam mem-framing gerakan, yaitu diagnosis elemen atau mendefinisikan strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut.

Adapun fungsi utama pembingkaihan bagi gerakan-gerakan sosial menurut Snow dan Banford diidentifikasi menjadi tiga hal. *Pertama*, gerakan sosial membangun bingkai-bingkai yang mendiagnosis kondisi sebuah persoalan yang perlu ditangani. Hal ini mencakup pelekatan tanggung jawab dan target-target kesalahan. *Kedua*, gerakan memberikan pemecahan terhadap persoalan tersebut, termasuk taktik dan strategi tertentu yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai obat untuk ketidakadilan. *Ketiga*, gerakan memberikan alasan-alasan dasar untuk memotivasi tumbuhnya dukungan dan tindakan kolektif. Meskipun para calon peserta mungkin memiliki pemahaman yang sama tentang sebab-musabab dan pemecahan terhadap persoalan tertentu, kerangka-kerangka motivasi diperlukan untuk meyakinkan para calon peserta agar mereka benar-

benar terlibat dalam aktivisme, dan dengan demikian mengubah public sekitar menjadi para peserta gerakan (Quintan Wiktorowica , 2013: 60)

Snow dan akademisi gerakan sosial lainnya menambahkan bahwa proses framing membuat orang mampu memformulasikan sekumpulan konsep untuk berpikir dengan menyediakan skema interpretasi terhadap masalah-masalah di dunia. Skema ini bisa melalui menyalahkan atau menyarankan garis aksi. Lebih jauh, gerakan dalam skala besar bisa menciptakan framing tunggal dengan cara kupas luas, yang sangat mungkin diartikulasi oleh gerakan sosial berikutnya.

Untuk mencapai sebuah kelompok sasaran, actor gerakan membutuhkan alat dalam menjalankan framing, yaitu, media. Untuk itu, debat mengenai proses framing juga memasukan media sebagai sebuah topic penting. Sepertihalnya yang diungkapkan oleh Zald bahwa pengkontestan framing terjadi dalam interaksi berhadapan dan melalui beragam media cetak dan elektronik, buku, maupun pamflet. Aktivistis gerakan memanfaatkan warung kopi, café, dan ruang-ruang pertemuan sebagai media berdebat untuk mensosialisasikan isu sehingga

kelompok masyarakat berkeinginan untuk terlibat dalam gerakan sosial tersebut.

Media seringkali memiliki agendanya sendiri. Media yang mengadopsi isu lingkungan akan berbeda dari media yang tidak memiliki agenda lingkungan hidup ketika mereka menurunkan laporan tentang bencana lingkungan. Karenanya, framing isu di dalam media menjadi bagian penting di dalam proses keseluruhan proses framing tidak hanya karena media memiliki agenda sendiri tetapi juga setiap orang memiliki interpretasi berbeda dalam sesuatu hal.

Hal ini senada dengan apa yang digagas oleh McCarthy dan Zald bahwa media merupakan target utama bagi upaya proses framing dalam gerakan sosial. Akan tetapi, media tidaklah satu-satunya. Upaya langsung mempengaruhi pemerintah, pemilihan umum dan agenda public juga bagian utama gerakan sosial. Gerakan sosial melebur dalam taktik yang langsung atau tidak langsung, menargetkan persepsi dan perilaku kelompok sasaran dengan mengkomunikasikan framing gerakan. Abdul Wahib Situmorang, : 45)

Dalam konteks gerakan-gerakan Islam, yang terlibat dalam produksi makna dan proses-proses pembeding

seperti banyaknya “gerakan sosial baru” yang dipicu oleh isu-isu tentang identitas, budaya, dan pasca materialism (ketimbang isu-isu kelas, ekonomi, atau kepentingan politik sempit), gerakan-gerakan Islam terlibat dalam berbagai pertarungan makna dan nilai-nilai.

Sebuah komponen penting dari seberapa besar bingkai diagnostic gerakan Islam adalah menyalahkan penyebaran nilai-nilai dan praktik-praktik Barat yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit sosial, termasuk pengangguran yang meningkat, mandeknya perkembangan ekonomi, hutang yang membengkak, langkay perumahan, berkuarangnya belanja sosial dan kesejahteraan public, dan sebagainya. Alasannya adalah bahwa jalan yang benar bagi perkembangan dan sukses digariskan dalam sumber-sumber Islam. Sejauh umat Muslim mengikuti jalan lurus ini, mereka akan diganjar atas kesetiaan mereka. Namun, serangan terhadap kode-kode budaya Barat tersebut mengikis kesucian adat kebiasaan Muslim dan mengurangi nilai lembaga-lembaga dan hubungan-hubungan sosial Muslim yang diperlukan bagi sebuah masyarakat yang sehat.

Sedangkan berkaitan dengan proses *framing*, Benford dan Snow menyebutkan ada tiga hal yang menjadi perhatian utama, yang disebut *core framing tasks*. Pertama

adalah *diagnostic framing*, yaitu yang dikonstruksikan dalam sebuah gerakan sosial guna memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang sifatnya problematik. Kondisi mengenai apa atau siapa yang disalahkan, sehingga membutuhkan adanya suatu perubahan (Benford dan Snow, 2000:615). Dalam level ini, aktor-aktor gerakan sosial mendefinisikan permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi isu utama yang membuat mereka menginginkan adanya perubahan. Kedua, *prognostic framing*, yaitu artikulasi solusi yang ditawarkan bagi persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dalam aktivitas *prognostic framing* ini gerakan sosial juga melakukan berbagai penyangkalan atau menjamin kemanjuran dari solusi- solusi yang ditawarkan (Benford dan Snow, 2000). Terakhir adalah *motivational framing*, yaitu elaborasi panggilan untuk bergerak atau dasar untuk terlibat dalam usaha memperbaiki keadaan melalui tindakan kolektif. (Benford dan Snow, 2000:617).

C. Gerakan Sosial Keagamaan

Agama merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Agama meliputi berbagai bidang kehidupan

manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Agama mengatur dari hal sederhana sampai pada hal yang kompleks. Agama menjadi filosofis hidup manusia dalam bertindak dalam kehidupannya. Agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dapat menjadi dasar dalam suatu pergerakan yang muncul dalam masyarakat. Perubahan zaman yang semakin hari kian pesat dengan membawa berbagai dampak pada kehidupan yang mulai menjauh dari nilai-nilai agama memicu bermunculannya gerakan sosial dengan basis agama untuk melakukan pembaharuan.

Nottingham (1990:155) menyebutkan, bahwa gerakan keagamaan merupakan setiap usaha yang terorganisir untuk menyebarkan agama baru atau interpretasi baru mengenai suatu agama yang sudah ada. Agama-agama besar dunia yaitu, Budha, Kristen dan Islam dapat dianggap sebagai hasil dari gerakan keagamaan. Demikian pula gerakan-gerakan keagamaan berkembang dalam kerangka agama-agama yang sudah mapan seperti gerakan Franciscan dan protestan dalam Katolik. Gerakan semacam ini pada umumnya melalui serangkaian tahap yang relatif terlalu baik setelah fase-fase pengembangannya yang pertama gerakan tersebut biasanya jadi mapan hubungannya dengan

agama lain. Fase yang lebih tenang dari gerakan gerakan keagamaan semacam itu bisa menjadi sumber timbulnya gerakan-gerakan keagamaan berikutnya.

Fase pertama suatu gerakan keagamaan dipengaruhi oleh kepribadian pendirinya. Betapa pun kadar pandangannya dibidang keagamaan, seorang pendiri yang berhasil mempunyai daya tarik yang sangat kuat, daya tarik yang mengikat, yang menarik orang kepadanya, sifat yang penting itu biasa disebut kharismatik. Max Weber menggunakan istilah tersebut, tidak hanya untuk pemimpin keagamaan tetapi juga untuk pemimpin politik salah satunya Adolf Hitler. Meskipun para pendiri gerakan keagamaan tersebut sering mengkritik organisasi keagamaan yang sudah ada, namun pesan keagamaan dan etika berasal dari mereka sendiri. Walaupun dalam beberapa hal terasa baru, jelas bersumber pada tradisi keagamaan ditempat dibesarkannya pendiri tersebut. Oleh karena itu, perintah suci Budha merupakan suatu pemberontakan terhadap agama Hindu tradisional dan juga sekaligus pada saat yang sama dipengaruhi oleh agama Hindu itu.

Fase kedua gerakan tersebut para pengganti si pendiri dipaksa untuk memecahkan dan menjelaskan masalah-

masalah penting mengenai organisasi, kepercayaan dan ritus yang dibiarkan tidak terurus selama si pendiri tetap hidup. Pada tahap ini secara khas sekarang kita sebut sebuah gereja : yaitu organisasi formal dari suatu kelompok pemeluk yang mempunyai kesamaan dalam kepercayaan-kepercayaan dan ritus-ritus bersama yang tetap terhadap wujud sakral yang mereka sembah.

Fase kedua ini, yang sering dipercepat dengan kedatangan generasi kedua dari orang-orang yang percaya, persyaratan-persyaratan bagi anggotanya dibuat lebih tegas dan jalur-jalur kekuasaan di dalam organisasi tersebut lebih diperjelas, lagi pula, kepercayaan mengenai orang suci dan misi si pendiri dirumuskan sebagai teologi yang resmi dan perbuatan si pendiri yang menyangkut penerimaan secara formal keyakinan-keyakinan yang terkandung seringkali menggantikan suatu kesetiaan yang lebih spontan dan personal terhadap ajaran-ajarannya.

Tahap kedua ini sering disertai dengan perjuangan merebutkan kekuasaan kepemimpinan, seperti perebutan-perebutan kepemimpinan Islam setelah Muhammad wafat, begitu juga dengan konflik-konflik yang mengguncangkan Kristen pada abad kedua dan ketiga Masehi. Untuk

mengatasi perebutan seperti itu kadang kadang diperlukan seorang “pendiri kedua”. Seperti agama Islam melahirkan Khalifah Umar sedangkan, agama Kristen melahirkan genius pengatur yaitu Paulus dari Tarsus yang ternyata banyak perbedaan dengan agama Kristen ajaran Yesus Kristen (Bahm, 1964:264).

Apabila suatu gerakan dapat berhasil mempertahankan diri pada tahap kedua, maka tahap ketiga pada umumnya merupakan tahap pengembangan dan diservikasi lanjutan. Gerakan ini menjadi mapan dan mengambil berbagai macam bentuk organisasi. Gerakan-gerakan keagamaan berbeda dengan tingkat pengembangannya, beberapa organisasi keagamaan tetap terhalang oleh rintangan etnik, kelas dan kebudayaan. Agama Budha, Kristen, dan Islam melewati rintangan rintangan ini dan disamping itu ketiganya berhasil mengajak masuk orang-orang yang mempunyai kekuasaan besar dibidang politik, dan ekonomi kedalamnya.

Tahap ini, gerakan keagamaan menghadapi bahaya menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Disini berhadapan langsung dengan dilema organisasi yang dibicarakan pada bagian sebelumnya. Pada tahap ketiga

ini, para pemimpin mempunyai tugas untuk menjawab, meskipun gerakan tersebut banyak memperoleh banyak pengikut, namun pemimpin juga telah dihadapkan kepada masalah-masalah sulit untuk menginterpretasikan kembali pada tujuan yang sekian lama belum tercapai. Pada tahap ketiga ini perkembangan gerakan- gerakan keagamaan bergandengan tangan dengan gerakan politik yang mempunyai kepentingan pokok yaitu kelangsungan hidup mereka sendiri, yang merupakan tujuan utama organisasi mereka.

Organisasi Budha Tzu Chi, gerakan sosial keagamaannya bersumber pada ajaran-ajaran agama Budha, dimana pada sejarahnya Budhisme didirikan oleh Sidharta Gautama (560-480 SM) yang bergelar Budha, orang yang berpengetahuan luas. Selain itu ia digelari „Sakiya Muni“ yang bersemedi. Sidharta Gautama dibesarkan di sebuah kampung di perbatasan Nepal. Ia adalah seorang Pangeran yang hidup dalam kemewahan. Menikah pada usia 19 tahun. Kemudian pada umur 26 tahun ia pergi meninggalkan istrinya, bertapa meninggalkan segala kenikmatan duniawi. Selanjutnya ia menjalani kehidupan yang sangat sederhana, merenungi alam, melatih jiwa dan bercita- cita ingin menyelamatkan manusia dari penderitaan yang bersumber

dari hawa nafsu. Kemudian ia menyeru manusia agar mengikuti arah pemikirannya. Pendiri yayasan Budha Tzu Chi, Master Cheng Yen menjadikan ajaran-ajaran agama Budha sebagai ruh gerakan organisasi tersebut.

Clarke (2006:12) mengemukakan, penjelasan sosiologis yang paling umum untuk munculnya gerakan keagamaan baru disebabkan penafsiran masyarakat agama sebagai respon atas krisis identitas, makna moral dan pergolakan budaya yang mendalam untuk membawa tentang perubahan sosial yang cepat. Gerakan-gerakan keagamaan baru “*New Religious Movement*” memperlihatkan perkembangannya pada abad ke-20. Gerakan keagamaan baru adalah cara-cara pemujaan dimana banyak diantaranya bukan merupakan pemisahan sekretarian dari agama-agama yang ada, tetapi gerakan-gerakan yang diilhami oleh individu kharismatik tertentu atau sekumpulan ajaran dari suatu latar religius kultural yang diambil dari bagian agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia.

Beberapa gerakan keagamaan baru dengan pengikutnya di Eropa, USA dan Amerika Utara mengambil praktik-praktik dan ide-ide keagamaan Timur, kebanyakan berasal dari anak benua India meliputi Brahma Kumaris, Hare

Krisna, Rajneeshism (Osho), Yoga dan Sai Baba. Beberapa gerakan keagamaan baru dikaitkan dengan ajaran pimpinan keagamaan seperti Ron Hubbard (*Scientology*), Moses David (*Children of God or the Family*), John Wimber (*Vineyard Christian Fellowship*), dan Maharishi (*Transcendental Meditation*). Perkembangan gerakan keagamaan baru sangat cepat terjadi di Eropa dan Amerika, sedangkan Jepang memperlihatkan pertumbuhan yang pesat selama ±30 tahun terakhir, dan kini gerakan keagamaan baru sangat lazim di negara-negara berkembang di Asia Tenggara dan Amerika Latin.

Munculnya fenomena gerakan keagamaan baru, sebagai sebuah gerakan untuk pertama, meng *counter* budaya yang muncul sekitar tahun 1960-an dimana melawan bentuk kehidupan masyarakat modern yang materialisme, utilitarian, individualisme dan menggunakan teknik rasional dari ilmu pengetahuan yang mendominasi suatu kultur masyarakat. Kedua, adanya dominasi secara ilmiah dan sosial dapat merusak tekanan dalam diri individu, tanggung jawab personal dan hilangnya pandangan hidup tradisional dalam masyarakat. Ketiga, kemunduran dalam agama-agama atau aliran ketuhanan dalam kehidupan individu dan berkembangnya perspektif sosial terhadap

sesuatu yang ilmiah, sehingga kesemuanya itu memberikan sebuah eksperimen yang sangat berarti di dalam semua segi kehidupan, termasuk politik dan gaya hidup (*life-style*) dan juga agama sebagai respon dari dehumanisasi akibat kemajuan teknologi. Akibatnya berkembang mistisisme dan reformasi kesadaran (*consciousness*). Keempat, terbuka terhadap gagasan dan cara pemikiran baru. Kelima, adanya kekecewaan atau keprihatinan terhadap sistem sosial modern dan kehidupan urban yang impersonal atau individualistik. Gerakan ini berakar pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dimana gerakan agama baru telah muncul, kondisi yang menentukan sumber daya yang tersedia untuk mereka. (Wallis dalam Aldridge, 2007:50).

Klenk (2012:3) mengemukakan bahwa dalam studi agama fenomena gerakan keagamaan baru, telah menjadi semakin populer, disejajarkan dengan kesadaran sosial, dihidupkan kembali dari agama itu sendiri. Bentuk-bentuk baru dari religiusitas, organisasi keagamaan dan agama tampaknya muncul di seluruh dunia. Oleh karena itu, fenomena ini tidak terlepas dari kaitannya dengan globalisasi. Namun, cukup mengejutkan, fenomena ini jarang dimasukkan ke dalam konteks yang lebih besar dari globalisasi teori. Agama tetap dibahas sebagai bagian

diluar masyarakat dan menentang atau hanya berhubungan dengan globalisasi.

Gerakan keagamaan baru adalah jenis tertentu dari sistem komunikasi yang mendapatkan bentuk mereka yakni, bentuk mobilisasi komunikasi untuk isu-isu agama. Dengan memobilisasi komunikasi isu agama, gerakan keagamaan baru berkontribusi pada sistem agama dan dengan demikian dapat diamati sebagai agama. Gerakan keagamaan baru dapat mengambil bentuk secara bervariasi, misalnya, memiliki bentuk gerakan protes, gerakan revitalisasi, gerakan individualisasi, gerakan genostik, gerakan reformasi atau bentuk campuran. Namun, satu masalah definisi tetap belum terpecahkan: pertanyaan terakhir. Mengingat sistem yang disebutkan di atas analisis teoritis modern masyarakat dunia. Klenk, menyarankan membatasi gerakan keagamaan baru untuk gerakan-gerakan keagamaan yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari, atau dalam masyarakat fungsional untuk dibedakan.

Definisi ini memiliki keuntungan untuk mengikat untuk perubahan radikal dalam struktur sosial. Apakah gerakan tertentu dapat digambarkan sebagai gerakan baru yang tidak lagi tergantung pada seseorang untuk mengubah fokus dalam waktu atau budaya, tetapi pada tujuan. Gerakan

keagamaan baru, sebagai tantangan: konsep baru, solusi, struktur, dan harapan baru. Dalam struktur dan fungsi yang sangat mirip dengan gerakan protes. Gerakan agama baru meningkatkan perhatian dan memobilisasi komunikasi pada isu-isu agama. Jika berhasil, gerakan-gerakan dan visibilitas sosial mereka sering tidak dapat diabaikan oleh agama, denominasi atau organisasi keagamaan.

Gerakan agama baru dapat memberikan informasi dari perspektif teoritis sistem. Karena gerakan ini harus dipahami sebagai gerakan keagamaan yang modern, yang memobilisasi komunikasi untuk isu-isu agama. Mereka mendapatkan bentuk khusus mereka sebagai gerakan menurut jenis mereka seperti mobilisasi (revolusioner, reformatif, protes, revitalisasi, individualisasi, politisasi). Dalam definisi baru ini, Klenk berusaha untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat diterapkan pada studi agama dalam masyarakat dunia dan meningkatkan pemahaman kita tentang gerakan agama baru dalam konteks globalisasi. Atas dasar beberapa contoh kita mengidentifikasi lima mekanisme yang relevan diantaranya.

Pertama, gerakan agama baru yang mengglobal saat mereka menjadi terorganisir secara global. Kedua, gerakan

agama baru sering mengandalkan dan memanfaatkan konsep budaya mengglobal dan simbol, yang tersedia di ruang budaya dunia . Ketiga gerakan agama baru harus dipahami sebagai realisasi lokal bentuk agama (ide-ide dan konsep) dari sistem agama dunia . Keempat, gerakan agama baru dapat berhasil memobilisasi dan komunikasi untuk isu-isu agama. Dengan itu gerakan ini dapat menjadi tantangan serius bagi tradisi agama tradisional dan komunitas agama, dengan demikian menjadi dipaksa untuk bereaksi dalam konteks global baru. Kelima, gerakan keagamaan baru, memberikan solusi baru dan penawaran makna sebagai serta mereka dapat membangun struktur yang memberi spirit kembali ke agama lain, yang dengan demikian menjadi mengglobal sendiri

Perkembangan tersebut apabila dilihat dalam sudut pandang sosiologis, dap kita tarik pada istilah “Teori Fungsional”. Teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang sedemikian rupa dimana

setiap bagian (masing-masing unsur kelembagaan) saling tergantung dengan bagian lainnya, sehingga perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan (O"dea, 1992:3).

Dalam pengertian ini, agama merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang telah terlembaga. Karena itu lahir masalah, sejauh mana sumbangan masing masing kompleks kelembagaan ini dalam mempertahankan sistem sosialnya. Sumbangan demikian mungkin nyata atau hakiki. Sumbangan itu bisa sedemikian rupa sehingga berada dalam pemahaman para pelaku dan dapat di luar jangkauan kesadaran para pelaku itu sendiri. Dengan kata lain, sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial, lembaga sosial itu mempunyai fungsi manifes dan fungsi laten lembaga/organisasi keagamaan dalam memelihara keseimbangan sistem sosial (Merton, 1958:82).

Pada kajian Sosiologi agama, seperti Odea (1992:25) menjelaskan, bahwa agama juga mempunyai fungsi dalam masyarakat. Istilah fungsi menunjukkan sumbangan yang diberikan pada agama, atau lembaga sosial lain, untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha-

usaha yang aktif dan berjalan terus-menerus. Dengan demikian peranan yang dilakukan oleh agama dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat menjadi hal yang utama. Dalam pendekatannya terhadap fungsi sosial agama, tentunya akan menjadi perhatian menarik untuk menganalisis tipe-tipe organisasi keagamaan yang bermacam-macam, tipe-tipe kepemimpinan dan keanggotaan yang beraneka ragam serta hubungan timbal-balik antara lembaga-lembaga keagamaan dengan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat.

Agama menjadi sistem sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat. Solidaritas ini menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan / atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Agama memiliki nilai-nilai sebagai ajarannya. Nilai-nilai inilah yang menjadi perekat masyarakat. Sedangkan Tuhan hanyalah idealisme dari masyarakat itu sendiri yang menganggapnya sebagai makhluk yang paling sempurna. Tuhan adalah personifikasi masyarakat. Oleh karena itu, agama dalam konteks Durkheim menjadi sangat fungsional, yakni merekatkan masyarakat melalui nilai-nilai yang harus dijaga. Hal yang menarik dalam

agama adalah bukan pada apa yang berbeda mengenai karakteristik keyakinan dan ritual dari agama-agama yang ada, melainkan apa yang sama dalam hal kerjanya, yakni mengenai fungsi-fungsi yang dijalankan semua agama bagi sistem sosialnya (Durkheim, 1949:98).

Sumbangan agama dalam pemeliharaan masyarakat menjadi penting untuk melihat batasan mana saja ketika masyarakat menjadikan agama sebagai kebutuhannya secara serius meskipun tidak semua kebutuhannya dapat ditemukan dalam kehidupan beragama. Salah satu hal yang mendasar kebutuhan tersebut dapat berjalan karena adanya konsensus dalam masyarakat untuk menepati janji sosialnya untuk melakukan kewajiban secara bersama-sama, namun jika tidak dilakukan akan menghadapi keruntuhan. Oleh karena itu konsensus dalam masyarakat berkenaan dengan adanya kekuatan yang mampu memaksa orang-orang dan pihak-pihak untuk melaksanakan kewajiban tersebut, minimal dibutuhkan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam kajian sosiologi agama ada beberapa hal yang membuat kekuatan tersebut dapat berjalan dan mempengaruhi orang-orang untuk mengorbankan kepentingan pribadinya demi terpenuhinya kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pertama, agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial tersebut dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Dalam peranan ini agama telah membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Kedua, terdapat alasan-alasan yang kuat untuk mempercayai agama juga telah memainkan peran vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendukung dan memperkuat adat-istiadat. Dalam hubungan ini patut diketahui bahwa sikap kaitan dengan adat-istiadat (moral) yang berlaku, berhubungan erat dengan perasaan-perasaan kagum yang timbul oleh kesakralan dalam agama itu sendiri (Nottingham, 1990:36).

Nilai-nilai dalam agama di masyarakat berupaya mencapai tujuan-tujuan terpenting dari kegiatan sosial tersebut, namun dalam hal lain masyarakat berusaha agar juga tingkah laku sehari-hari dari pada anggota masyarakat pada umumnya sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dapat dilihat dalam penjelasan ini, bahwa semua masyarakat sedikitnya banyak ditemukan konsep-konsep yang jelas mengenai tingkah laku yang diakui sesuai itu. Standar

tingkah laku kepatuhan yang ideal, yang membentuk nilai-nilai sosial ini, sering disebut oleh sarjana-sarjana sosiologi sebagai norma-norma sosial.

Pendapat Durkeim yang menjelaskan bahwa semua benda dan makhluk yang oleh manusia diberika sakral pada dasarnya hanyalah lambang-lambang dari kelompok manusia itu sendiri, dan menempatkan masyarakat sebagai tujuan akhir peribadatan manusia (Durkheim, 1949:206). Dalam penjelasan tersebut telah banyak membuka pemikiran para sosiolog agama khususnya tentang tekanan terhadap sifat-sifat dari segala sesuatu yang bersifat sakral. Persepsinya terhadap kekuatan memaksa yang dimilikinya menunjukkan beberapa hal penting yang membuktikan bahwa sanksi-sanksi sakral memperkuat nilai-nilai masyarakat.

Peranan sosial agama dapat dilihat terutama sebagai sesuatu yang mempersatukan. Dalam pengertian harfiahnya, agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban - kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan bersama dalam masyarakat. Agama juga cenderung melestarikan nilai-nilai sosial. Fakta yang

menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan itu sakral berarti bahwa nilai-nilai keagamaan itu tidak mudah diubah karena adanya perubahan-perubahan dalam konsepsi- konsepsi kegunaan dan kesenangan duniawi.

Meskipun agama mempunyai peranan di dalam masyarakat, sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun ia juga mempunyai fungsi yang lain (Merton, 1958:30). Memang agama mempersatukan kelompok pemeluknya sendiri begitu kuat sehingga apabila ia tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat, ia bisa menjadi kekuatan yang menceraai-beraikan, memecah-belah dan bahkan menghancurkan. Di samping itu agama tidak selalu memainkan peranan yang bersifat memelihara dan menstabilkan. Khususnya pada saat terjadi perubahan besar di bidang sosial dan ekonomi, agama sering memainkan peranan yang bersifat kreatif, inovatif dan bahkan revolusioner.

D. Gerakan keagamaan dan Perubahan Sosial

Secara umum terdapat dua aliran yang melihat peran agama dalam proses perubahan sosial. Posisi *pertama*

memandang bahwa agama dimaknai sebagai institusi yang menghambat proses perubahan sosial. Pada posisi ini agama dimaknai sebagai kekuatan konservatif karena agama tidak dapat mendukung perubahan sosial. Pada posisi yang *kedua*, sebaliknya memandang agama sebagai unsur penting yang turut mempercepat perubahan sosial masyarakat. Agama dikatakan sebagai kekuatan konservatif karena dapat dimaknai sebagai kekuatan untuk menolak perubahan dan cenderung mempertahankan status *quo*.

Kelompok fungsionalis berpegang bahwa masyarakat harus berada pada posisi yang stabil, seimbang, terintegritas, dan agama dalam hal ini berfungsi untuk mempertahankan stabilitas sosial, keseimbangan antar unsur masyarakat, solidaritas dan integrasi sosial. Agama dalam defenisi ini menyediakan seperangkat nilai, norma, kepercayaan, serta melindungi individu dari berbagai gangguan yang dapat merusak kehidupan sosial.

Agama berfungsi membantu mempertahankan eksistensi kelangsungan hidup masyarakat (Scahrf, 2004:107).

Weber, (2009:408) memiliki pandangan bahwa agama melakukan fungsi-fungsi yang sangat berbeda untuk

berbagai strata sosial dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial. Bagi strata sosial yang memiliki hak-hak istimewa, agama berfungsi sebagai alat melegitimasi atau membenarkan posisi sosial mereka yang berkuasa untuk memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki hak-hak yang istimewa, agama penting perannya sebagai alat kompensasi dalam kehidupan lain atas kegagalan dan ketidakcukupan dalam hidup sekarang. Untuk itu, peran agama dianggap lebih konservatif.

Istilah konservatisme yang kedua dimaknai sebagai nilai-nilai dan kebiasaan yang bersifat tradisional. Apabila agama dianggap mempertahankan status quo, hal ini juga berarti bahwa agama memelihara nilai-nilai dan kepercayaan tradisional. Nilai-nilai dan kepercayaan yang bersifat tradisional ini dianggap menghambat terjadinya perubahan sosial. Sementara untuk bentuk yang kedua, konservatisme adalah kelompok fundamentalisme. Defenisi ini memang menyiratkan bahwa kelompok fundamentalis bersifat kaku dalam memaknai perubahan sosial. Fundamentalisme sering disamakan dengan kelompok ekstrimisme, fanatisme politik, terorisme dan anti Amerika. Secara historis istilah fundamentalisme dialamatkan pada sekte Kristen Protestan yang menganggap injil bersifat absolut dan sempurna dalam

arti literal dan demikian mempertanyakan satu kata yang ada dalam injil dianggap dosa besar dan tidak terampuni.

Fundamentalisme merupakan gerakan reaksi terhadap pola perubahan yang timbul dari proses industrialisasi dan urbanisasi. Pada sisi yang lain kelompok ini juga mendukung perubahan sosial, mereka sangat kritis terhadap perubahan berbagai kelompok tertentu yang ingin menyingkirkan posisi agama dalam kehidupan sosial. Agama dalam hal ini memberikan berbagai pengalaman dan pemaknaan mengenai berbagai kontradiksi tersebut (Haralambos dan Holborn, 2004). Agama menyediakan berbagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi manusia.

Untuk itu agama memiliki peran yang cukup strategis dalam memandu proses perubahan sosial tersebut.

Munculnya organisasi keagamaan dengan segala bentuk gerakannya mengandung arti penting, bahkan sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan merupakan bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk terus bertahan. (Puspito, 1983:27). Lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang sedemikian rupa di mana setiap bagian (masing-masing unsur kelembagaan itu) saling

bergantung dengan semua bagian lain, sehingga perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan. Dalam pengertian ini, agama merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terlembaga. (O"Dea, 1996:2).

Pada masyarakat primitif, agama telah meluas secara merata ke berbagai kegiatan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Ada dua faktor yang cenderung untuk memunculkan perubahan dari situasi agama yang primitif dan kuno serta berciri dari kelompok baik agama maupun sosial ke arah agama yang terorganisir secara khusus. *Pertama*, meningkatnya secara total "perubahan batin" atau kedalaman beragama (*inner differentiation*). Karena pembagain kerja masyarakat kian berkembang yang kemudian melahirkan alokasi fungsi, alokasi fasilitas serta sistem imbal jasa yang kian ruwet, maka masyarakat cenderung mengembangkan suatu tingkat spesifikasi fungsi yang lebih tinggi. Kemudian tampillah kelompok kelompok dengan tujuan yang lebih jelas dan terperinci untuk melaksanakan kegiatan seperti produksi, pendidikan yang ditangani oleh keluarga. Agama yang terorganisasi secara khusus ini lahir sebagai akibat dari kecenderungan umum ke arah fungsional. *Kedua*, meningkatnya pengalaman keagamaan yang mengambil

bentuk dari dalam berbagai ragam corak organisasi keagamaan baru. (Wach, 1971:109).

Ekspresi sosial dari ajaran serta kepercayaan agama dihidupkan dan dipelihara oleh adanya organisasi keagamaan. Tidak ada satu agama pun yang dapat terus berkembang tanpa organisasi keagamaan.

Keberadaan organisasi keagamaan itu kadang tidak disadari oleh para anggotanya, karena lahir dan bereksistensi secara alamiah dan simultan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam masyarakat yang kompleks organisasi keagamaan diperlukan demi terselenggaranya pertemuan, pengajaran, ritual dan untuk menjalin hubungan antar anggota secara internal, maupun antar kelompok di dalam masyarakat. Organisasi formal keagamaan umumnya dijumpai pada masyarakat yang telah berkembang difrensiasi, spesialisasi dan stratifikasi sosialnya. Kehadiran organisasi keagamaan yang khusus seperti itu sebagai konsekuensi dari meningkatnya spesifikasi dan pembagian kerja, sebagai atribut masyarakat urban.

Robetson, (1970:69) membuat suatu model yang menggambarkan hubungan antara tingkat homogenitas atau heterogenitas macam agama yang terdapat dalam

masyarakat dengan organisasi keagamaannya menjadi empat tipe, seperti pada skema berikut ini :

Tabel 2.1
Tipe Hubungan Antara Diferensiasi Agama dengan
Organisasi Keagamaan

Tingkat Organisasi Difrensiasi Agama	Agama, Relatif Terorganisir	Agama, Relatif Tidak terorganisir
Agama Heterogen	Pertama	Ketiga
Agama Homogen	Kedua	Keempat

Sumber : Ronald Robertson, (1970 : 69)

Tipe *pertama*, hubungan agama dengan masyarakat luas, terdapat bagian dunia industri. Agama secara organisasi terpisah dari kehidupan ekonomi, politik dan pendidikan. Pada masyarakat ini pembagian kerja dan spesialisasi telah berkembang secara lanjut. Tipe *kedua*, secara historis sering terdapat dikerajaan yang menganut agama negara, dengan sistem birokrasi sentral seperti Mesir yang mempunyai kecenderungan melaksanakan teokrasi secara ketat. Agama terorganisir pada tingkat pemerintahan difungsikan dalam

kehidupan politik, ekonomi, pendidikan dan kegiatan lain, misalnya juga pada masyarakat Roma Katolik pada zaman modern di daerah Portugal dan Spanyol. Demikian pula pada masyarakat Islam pada umumnya cenderung terorganisir relatif tidak memisahkan kegiatan agama dengan non-agama.

Tipe *ketiga*, relatif jarang, dengan contohnya adalah kelompok pengikut sekte agama di Amerika Serikat yang terpisah dari suasana aktivitas yang terorganisir, hanya menyebarkan literatur agama dan sewaktu-waktu berkumpul. Tipe *keempat*, terdapat di masyarakat primitif, dimana antara kegiatan agama dengan kegiatan lainnya erat hubungannya. Agama tidak terpisah dari kegiatan lainnya. Tetapi tidak ada organisasi keagamaan yang khusus, terpisah. Bellah mengemukakan, hubungan antara keadaan masyarakat dengan agama sebagai berikut. Dalam masyarakat primitif tidak terdapat organisasi keagamaan yang terpisah dengan struktur sosial. Pada masyarakat primitif, usia merupakan kriteria kepemimpinan terpenting dalam kehidupan seremonial. Kehidupan ritual memperkuat solidaritas masyarakat dan sekaligus merupakan bentuk pewarisan norma perilaku kesukuan. (Bellah, 2000:214).

Semua organisasi sosial membentuk tingkah laku manusia sesuai dengan pola yang ditentukan, baik itu pola yang ditentukan oleh doktrin agama, ajaran etik maupun filsafat polistik, pasti menghadapi suatu dilema. Apabila organisasi-organisasi tersebut ingin berhasil dalam mempengaruhi masyarakat sesuai dengan arah dan tujuannya masing-masing, maka organisasi itu harus berhasil dalam dua sektor. *Pertama*, pihak organisasi harus menertibkan kebiasaan-kebiasaan para anggotanya sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai, sedangkan yang *kedua*, apabila organisasi ingin mempengaruhi masyarakat luas, mereka jelas harus kemanusiaan yang sama seperti masalah kehidupan sosial pada umumnya, bukan melihat dari sisi supernaturalnya.

Yinger (1946:59) berpendapat bahwa titik temu akan segera tercapai apabila anggota-anggota dan kekuatan suatu organisasi telah cukup memadai untuk melancarkan pengaruh sosialnya yang kuat tanpa mengorbankan tujuan tujuan etik dan keagamaan yang esensial. Apabila kedua tujuan ini dapat tercapai secara penuh dan serentak, tentu saja tidak akan terjadi dilema lagi. Namun Yinger menyatakan, bahwa kesempatan-kesempatan untuk memperoleh keseimbangan ideal itu meningkat. *Pertama*, apabila suatu

organisasi yang berpengaruh besar dengan cukup fleksibel dapat terus memberi tempat bagi berbagai kelompok yang lebih kecil, kuat dalam disiplin dan semangat keagamaan, dan bertindak sebagai penolong di bidang spiritual atau yang kedua, apabila suatu organisasi yang relatif kecil tetapi intensif dapat mempertahankan kemurnian etiknya walaupun pada saat yang sama berusaha mentranfer cara-cara untuk memperluas pengaruhnya di dunia.

Hutchison (2012:6), mengemukakan pemikirannya yang menyebutkan literatur gerakan sosial telah membayar sedikit perhatian untuk peran agama pada gerakan sosial progresif, dan hampir tidak ada perhatian pada peran spiritualitas. Namun jelas bahwa organisasi keagamaan telah berhasil dalam sejumlah gerakan sosial. Marx dan Mc Adam (1994), menyebutkan bahwa organisasi keagamaan adalah salah satu dari empat persemaian untuk masa depan sosial gerakan, bersama dengan perguruan tinggi dan universitas.

Organisasi keagamaan menyediakan infrastruktur yang kaya untuk mobilisasi gerakan. Hal ini jelas, bagaimanapun, bahwa teks-teks agama yang sama dapat dan telah digunakan untuk membenarkan baik progresif dan defensif sosial gerakan. Selanjutnya, kelompok agama

sering memutuskan bahwa tindakan politik adalah di luar lingkup agama. Tapi jika sejarah adalah predikat terbaik dari masa depan, ada kemungkinan bahwa organisasi keagamaan akan terus menjadi pemain kunci dalam gerakan sosial progresif. Sangat sedikit perhatian telah diberikan kepada peran spiritualitas dalam motivasi partisipasi dalam gerakan sosial progresif, tetapi artikel baru-baru ini beberapa telah mengakui bagaimana aspek spiritual agama berfungsi sebagai motivasi untuk tindakan. Ilmu-ilmu sosial enggan untuk terlibat topik spiritualitas, tetapi motivasi spiritual untuk terlibat dalam gerakan sosial progresif adalah lahan subur bagi analisis masa depan.

Organisasi keagamaan yang tumbuh secara khusus semula berasal dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri organisasi itu dan para pengikutnya. Dari pengalaman demikian lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan, yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang sangat terlembaga. Pengalaman keagamaan, sebagaimana yang diketahui, menunjukkan suatu terobosan pengalaman sehari-hari, dengan begitu ia merupakan pengalaman kharismatik.

JARINGAN GUSDURIAN

A. Gerakan Sosial-Kultural Non Politis

Meskipun sudah wafat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sosok Gus Dur hingga saat ini masih berpengaruh dan menjadi panutan bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia, terutama warga masyarakat kalangan Nahdliyyin. Hal ini menegaskan bahwa gagasan Gus Dur memang seakan ada terus menerus dan tak lenyap dimakan jaman. Bagi sebagian masyarakat, spirit dan gagasan besar serta kebijakan politisnya yang dikenal begitu demokratis dan pro terhadap keragaman bangsa tidak mudah untuk dilupakan, apalagi melihat berbagai realita dimana bangsa Indonesia di berbagai segi masih memprihatinkan.

Gagasan empat pilar kebangsaan yang diciptakan oleh para *founding fathers* bangsa juga seakan sudah mulai luntur jika melihat tingginya intensitas aktivitas masyarakat yang kian menunjukkan sisi intolerannya. Meningkatnya sejumlah insiden kekerasan dan intoleransi dalam masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dan disertai dengan penegakan hukum yang lemah, membuat masyarakat sipil perlu berjuang sendiri untuk menekan keberlanjutan fenomena yang meresahkan ini. Seiring waktu berjalan, gagasan Gus Dur kian dirindukan dan menjadi *urgent* untuk kembali diperjuangkan.

Lahirnya komunitas dalam bentuk jaringan Gusdurian merupakan bukti nyata kerinduan atas sosok bapak bangsa. Kerinduan yang tidak hanya rindu pada Gus Dur sendiri, tetapi yang lebih penting rindu pada pemikiran dan gagasan yang sangat pro dan anti kekerasan dimasa beliau masih hidup terutama sewaktu menjabat presiden sangat dirindukan kembali. Menurut Yuska Harimurti salah seorang Kordinator Gerdu Kampung dan saat ini aktif di bagian Humas di BEC (Buddhist Education Centre) mengatakan bahwa lahirnya Gurdurian ini tidak hanya semata mata kecintaan akan sosok Gur Dur, tetapi juga bertekad untuk melestarikan ajara-ajaran yang diajarkan

oleh beliau. Hadirnya Gusdurian ini dirasa sangat penting untuk melakukan tindakan/sikap untuk melontarkan pandangannya terkait kasus-kasus kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Seperti yang terdapat dalam buku saku jaringan Gusdurian dalam kode etiknya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan komunitas Gusdurian adalah jaringan kultural, bersifat terbuka, non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai nilai, dan prinsip, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam kordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid (Seknas, 2016 :49]

Gusdurian adalah sebutan untuk para murid, pengagum dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Para Gusdurian mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur. Gusdurian menyebar di berbagai penjuru bangsa, bahkan penjuru dunia. Sampai bulan agustus 2011, komintas gusdurian bersifat mandiri telah muncul di lebih dari 30 kota di indonesia. Jaringan

Gusdurian adalah sinergi karya para penerus pemikiran / perjuangan Gus Dur untuk bangsa Indonesia, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kebangsaan, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dalam jaringan Gusdurian berhimpun individu-individu maupun komunitas-komunitas yang mengabdikan diri pada misi merawat warisan Gus Dur melalui berbagai strategi kerja. (Wahyuni, *Wawancara*, 22 Juli 2019)

Gerakan Gusdurian sendiri mulai muncul dan berkembang sejak tahun 2010, beberapa saat setelah Gus Dur berpulang. Dalam perkembangannya, gerakan Gusdurian makin solid berkat kekuatan jaringan dan tetap konsisten dalam mempertahankan karakteristiknya sebagai gerakan yang mengutamakan sisi voluntarisme, berusaha mempertahankan sikap apolitis dari tindak politik praktis dan menjaga informalitas dari sisi pengorganisasiannya. Jaringan Gusdurian adalah arena sinergi bagi para Gusdurian di ruang kultural dan non politik praktis. Di dalam jaringan Gusdurian tergabung individu, komunitas/ forum lokal, dan organisasi yang merasa terinspirasi oleh teladan, nilai, pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Karena bersifat jejaring kerja, maka tidak diperlukan keanggotaan formal. (Yuska Harimurti, *Wawancara*, 21 Juli 2019)

Jaringan Gusdurian memfokuskan sinergi kerja non politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah di tekuni oleh Gus Dur, meliputi empat dimensi besar, yaitu: Islam dan keislaman, Kultural, Negara, dan Kemanusiaan. Jaringan Gusdurian juga tidak terikat tempat, karena para Gusdurian alias anak-anak ideologis Gus Dur tersebar di berbagai penjuru Indonesia, bahkan di manca negara. Di berbagai tempat terbentuk komunitas-komunitas lokal, namun sebagian besar terhubung melalui forum dan dialog karya. (Yuska Harimurti, *Wawancara*, 21 Juli 2019)

Gerakan sosial (*social movement*) gusdurian dilakukan secara terorganisir. Sebagian besar perilaku kolektifnya terorganisasi, baik pemimpin, pengikut, maupun proses gerakannya dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bergerak untuk menerima atau menolak nilai/normadengan jalan terorganisir Dengan demikian maka secara umum, gerakan sosial merupakan upaya sadar, kolektif, dan terorganisir untuk mendorong atau menolak perubahan dalam tatanan sosial. Hal ini mengandung arti bahwa kriteria utama dari gerakan social adalah bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan secara fundamental dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Giddens, sebagaimana disebutkan dalam Situmorang (2007:3) bahwa gerakan

sosial adalah gerakan untuk mencapai suatu kepentingan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Lebih lanjut pula bahwa gerakan juga memiliki beberapa karakter sebagaimana gerakan sosial baru (*new movement*) dengan memperhatikan pada: pertama, gerakan sosial dilakukan oleh masyarakat, dan bukan negara; kedua, gerakan sosial dilakukan secara sengaja dan kolektif sifatnya; ketiga, gerakan sosial adalah untuk mempengaruhi perubahan struktur sosial yang ada; keempat, gerakan sosial umumnya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dengan struktur sosial yang ada, dan ingin menggantinya dengan sistem baru yang dianggapnya lebih baik; dan kelima, gerakan sosial bisa berorientasi pada perubahan dan juga bisa pada anti perubahan (Situmorang, 2007:3).

Dism Terkait dengan gerakan sosial Islam yang menjadi fokus dalam isi buku ini maka yang dimaksud dengan gerakan sosial Islam adalah gerakan sosial yang menempatkan agama (Islam) pada pengertian konstruksi realitas sosial sehingga dapat membawa pada kesadaran kritis terhadap realitas sosial sebagai bentuk dialektika agama dengan budaya yang mendorong kearah perubahan sosial. Pemahaman agama dengan demikian tentu tidak hanya sebatas normatif-

dogmatis saja, tetapi agama (Islam) menjadi energi moral bagi perubahan sosial. Untuk mewujudkan transformasi agama pada kehidupan diperlukan transformasi lembaga sosial. Komunitas Gusdurian merupakan lembaga yang berbasis agama sebagai wujud praksis gerakan keagamaan. Segala aktivitas jaringan Gusdurian sebenarnya merupakan upaya pembumian nilai-nilai dan pesan keagamaan secara empiris dan nyata di tengah masyarakat.

Sedangkan munculnya komunitas Gusdurian lokal banyak dimotori oleh Gusdurian generasi angkatan pertama, yang bersemangat untuk berkumpul mendalami dan mengambil inspirasi dari teladan Gus Dur. Setidaknya sekitar 100-an komunitas Gusdurian lokal telah dirintis dan terus bertambah tiap tahunnya sampai sekarang. Untuk merangkai kerjasama dalam arena Jaringan Gusdurian, dibentuklah Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian. Amanah yang diemban adalah menjadi penghubung dan pendukung kerja-kerja para Gusdurian di berbagai penjuru.

Dalam menjalankan amanah jaringan, SekNas Jaringan Gusdurian memfokuskan diri pada program-program penyebaran gagasan, memfasilitasi konsolidasi jaringan, memberikan dukungan pada upaya atau program lokal,

program kaderisasi, dan peningkatan kapasitas jaringan. Selain itu, Seknas juga menjadi kordinator untuk program-program bersama lintas komunitas Gusdurian, serta menginisiasi kelas-kelas khusus terkait jaringan, beberapa diantaranya:

1. Kelas pemikiran Gus Dur
2. Forum kajian dan Diskusi
3. Kampanye anti korupsi
4. Pelatihan enterpreneurship
5. Forum budaya
6. Workshop Sosial Media
7. Dalam rintisan: Koperasi Gusdurian

Ada sembilan nilai yang menjadi nilai dasar perjuangan Gusdurian dalam bertindak, bersikap dan berperilaku, yang dikenal dengan “Sembilan Nilai Budi Utama”. (www.gusdurian.net) Adapaun sembilan nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Ketauhidan

Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha Ada, satu-satunya Dzat hakiki yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai

nama. Ketauhidan didapatkan lebih dari sekadar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingskapkan. Ketauhidan menghujamkan kesadaran terdalam bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagad raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai ketauhidan ini juga dijadikan sebagai nilai utama oleh Gusdurian Surabaya dalam melihat fenomena keagamaan.

2. Kemanusiaan

Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat keTuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan Penciptanya, demikian juga merendahkan

dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah, Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat

3. Keadilan

Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil, merupakan tanggungjawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggungjawab itu, ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

4. Kesetaraan

Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam

masyarakat. Nilai kesetaraan ini, sepanjang kehidupan Gus Dur, tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marjinal.

5. Pembebasan

Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain.

6. Kesederhanaan

Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap

berlebihan, materialistis, dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pem-belajaran dan keteladanan.

7. Persaudaraan

Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran.

8. Kesatriaan

Keksatriaan bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keTuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi: penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi, komitmen yang tinggi serta istiqomah. Keksatriaan yang dimiliki Gus Dur mengedepankan

kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses, seberat apapun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya.

9. Kearifan Lokal

Kearifan lokal bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal Indonesia di antaranya berwujud dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial-budaya-politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban.

B. Gerakan Gusdurian Menjawab Peluang Politik Pasca Reformasi

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa lahirnya gerakan sosial selalu dipicu oleh faktor eksternal di samping internal. Teori kesempatan politik (*Political opportunity*) memandang

bakwa kondisi dan situasi politik yang berkembang akan memicu lahirnya gerakan. Masa reformasi 1998 adalah momentum untuk tumbuh berkembangnya gerakan sosial Islam jaringan gusdurian. Momentum tersebut membuka kesempatan untuk membuka lembaran baru pada masalah sosial keagamaan. Kesempatan ini yang dimanfaatkan generasi muda NU untuk melakukan penguatan terhadap masyarakat sipil dengan berbagai pendekatan dan model gerakan, salah satunya lewat gusdurian.

Merujuk pada teori sosial yang menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena adanya perubahan struktur politik yang dilihat sebagai sebuah kesempatan (*opportuntunity*). Kesempatan politik selalu terkait dengan sumber daya yang bersifat eksternal. Sumberdaya ini digunakan oleh pelaku perubahan melalui terbukanya akses politik jejaring kelembagaan, dan perpecahan di tubuh elit politik untuk melakukan perubahan. (Tarrow, 1998:20). Hubungan antara kesempatan politik dan gerakan sosial tidak bersifat linear, tetapi bersifat kurvalinear. Menurut Peter Eisinger (1973:11-12), gerakan sosial sangat mungkin muncul dalam sistem politik yang menandai adanya percampuran antara keterbukaan dan tertutupan kesempatan politik. Dengan demikian, sangat sulit untuk memberikan batasan derajat

keterbukaan dalam kesempatan politik yang memunculkan gerakan sosial.

Dengan kerangka demikian, lahirnya gerakan sosial jaringan gusdurian juga tidak bisa dipisahkan dengan setting politik era reformasi yang memberi peluang tumbuhnya gerakan. Reformasi yang dicanangkan sejak 1998 membawa perubahan dalam semua lini kehidupan, tidak kecuali pada tatanan politik dan demokrasi. Namun demikian harus diakui bahwa secara umum, persoalan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia saat itu dihadapkan pada tiga masalah utama, yaitu: demokrasi beku, involusi politik, dan *political distrust*. (Hikam, 2000:170). Hal-hal yang menginspirasi munculnya gerakan jaringan gusdurian tentu tidak lepas pula dengan keprihatinan terhadap ketiga hal tersebut.

Berkait dengan demokrasi, perkembangan politik pasca reformasi justru mengindikasikan bahwa perubahan demokrasi yang sedang berjalan tidak menuju pada cita-cita *total reform* sebagaimana yang diharapkan pada awal mulanya, tetapi menuju perangkap demokrasi beku (*frozen democracy*) (Nugroho, 2002: xxiv). Hal itu ditandai dengan adanya perubahan tata kelola negara dari sistem otoriter ke

tatanan demokratis dengan banyaknya perubahan pada struktur kelembagaan politik, tetapi tidak diikuti dengan perubahan esensi demokrasi itu sendiri. Dominasi negara atas masyarakat memang melemah, namun demikian masih kurang disertai menguatnya *civility*. Anehnya lagi banyak partai politik tetapi tidak mengartikulasikan kepentingan publik, banyak LSM bermunculan tetapi tidak memberikan pembaruan bagi rakyat. Disamping itu masyarakat bersifat lebih terbuka namun diikuti dengan banyaknya tindak kekerasan, kriminalitas, dan intoleran lainnya.

Disamping reformasi belum tertuju pada reformasi secara totalitas, perubahan sosial politik saat itu hanya berjalan di tempat, tidak ada progress, dan tidak ada kemajuan yang berarti untuk penguatan demokrasi di Indonesia. Realitas ini dikenal dengan istilah involusi politik. Kondisi involusi politik ini dibiarkan terus akan mematikan demokrasi itu sendiri, karena tidak ada terobosan, maka harapan untuk pembentukan civil society yang ditandai *civility* dapat terjadi. Hal ini tentu bisa menghambat laju demokrasi, jika *civility* sebagai pintu masuk untuk perubahan politik tidak terlaksana, maka laju pembentukan tatanan masyarakat yang demokratis tertunda. Penguatan *civil society* pembentukan tatan demokrasi merupakan instrumen utama dalam

mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan di tanah air.

Problem yang tidak kalah pentingnya adalah *political distrust*, yakni bentuk delegitimasi masyarakat terhadap negara atas ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kebangsaan yang ada. *Political distrust* bisa mengancam legitimasi pemerintah dan demokrasi yang sedang berjalan. Realitas seperti ini dibutuhkan gerakan sosial yang secara konsisten mengawal agar negara bisa keluar dari *frozen democracy*, involusi politik, dan *political distrust* agar terwujud civil society dan demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya.

Realitas politik, sosial, dan keagamaan di atas mendorong lahirnya gerakan sosial gusdurian yang berbasis jaringan dengan segala elemennya baik di internal maupun eksternal. Gerakan sosial gusdurian tumbuh menjadi gerakan sosial (Islam) yang aktornya berlatar belakang sekumpulan orang-orang terutama anak muda yang mempunyai keperhatian pada realitas politik, demokrasi, sosial, dan keagamaan di Indonesia tersebut. Eksistensi jaringan gusdurian semakin menemukan relevansinya sebagai gerakan masyarakat sipil karena gerakan ini dengan kemandiriannya mempunyai peran sebagai advokasi, dan pengabdian terhadap persoalan

yang ada di masyarakat. Gerakan sosial jaringan gusdurian berupaya mendorong terwujudnya tata kelola negara yang demokratis, mendorong semangat pluralisme agama, dan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia sebagai bentuk *civil society*.

Gerakan sosial gusdurian dengan demikian menjadi anti tesis bagi negara maupun kelompok keagamaan yang mengusung ideologi intoleran.

C. Jaringan Gusdurian dan Mobilisasi Sumber Daya

Gerakan Gusdurian hingga kini semakin sukses melebarluaskan sayapnya bila dilihat dari semakin bertambahnya komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia hingga mencapai 100 (seratus)-an bahkan kini merambah hingga ke luar negeri. Dalam perkembangannya, gerakan yang pada awalnya timbul karena alasan emosional ini akhirnya berkembang menjadi sebuah gerakan sosial baru yang menempatkan kekuatan jaringan baik intern maupun antar komunitas sebagai modal utamanya dalam perkembangan gerakan. Gerakan ini juga begitu menarik

karena menghasilkan banyak aksi dan pergerakan, terdiri dari beragam aktor yaitu komunitas, individu dan lembaga, namun tetap berlandaskan dan diikat oleh satu hal, yaitu spirit Gus Dur.

Hal itu memberikan arti bahwa kesempatan politik saja memang tidak cukup untuk memunculkan gerakan social. Untuk itu diperlukan mobilisasi sumber daya. Dalam hal ini secara teori ini gerakan social dilihat sebagai manifestasi rasional dan terorganisir dari tindakan kolektif. Gerakan sosial Islam dapat berkembang selama mereka memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, baik material, media massa, legitimasi, identitas, maupun institusional (Tarrow, 1998:15). Dalam gerakan sosial, ada tiga bidang struktur mobilisasi sumberdaya. Pertama, struktur pemobilisasian politik formal, seperti partai politik; kedua, lingkungan legal masyarakat sipil, seperti LSM, masyarakat charitis, sekolah, dan organisasi profesional; dan ketiga, sektor informal jejaring sosial dan ikatan personal (Situmorang,2007:19)

Untuk itu gerakan gusdurian berupaya mengelola relasi antar berbagai aktor yang otonom dan kompleks dalam rangka mengelola kepentingan bersama tentu

membutuhkan adanya aplikasi dari konsep-konsep manajemen yang mampu menjawab tantangan terkait kompleksitas dan horizontalisme relasi dalam gerakan yang berbasis pada jejaring ini.

Penggunaan istilah jaringan disini tidak hanya sebagai cara pandang untuk memahami fenomena kontemporer dalam gerakan Gusdurian, namun menjadi strategi baru dalam pengelolaan kompleksitas relasi antar aktor yang bisa dikembangkan. Konsep jaringan sendiri didasarkan pada asumsi bahwa relasi para aktor tersebut saling bergantung satu sama lain, dimana para aktor tidak bisa mencapai tujuannya tanpa menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lainnya. Mekanisme saling ketergantungan ini berjalan melalui adanya pertukaran sumber daya antar aktor. Aturan dan pola distribusi tersebut hanya bisa diubah dan dikukuhkan lewat beragam interaksi dan negoisasi antar pelaku dalam jaringan (Jones, Hersterlet dan Borgatti, 1997; dalam Pratikno, 2008). Beroperasinya jejaring tidak berada dalam ruang yang hampa, namun ada struktur dengan norma tertentu yang membatasi kebebasannya dalam melakukan tindakan. Dengan berbagai interaksi konstitutif, mekanisme jaringan berpeluang sebagai cara mengelola tindak bersama dalam mengelola sumber daya,

sekaligus mengubah dan mengarahkan beragam pola dalam struktur jaringan.

Karena struktur dalam jaringan dibangun melalui interaksi yang bersifat sukarela dari para pelaku yang otonom, maka struktur yang dibangun bersifat *open-ended* process dan tak jarang bersifat fluktuatif. Stabil atau tidaknya struktur dalam jaringan ditentukan oleh tingkat interdependensinya, yakni melalui mekanisme pertukaran sumber daya yang relatif tetap dan tidak tergantung oleh mekanisme lain dalam struktur jejaring (Pratikno, 2008). Konsekuensinya, relasi yang terbangun bersifat konstitutif. Perilaku dan pilihan strategi yang diambil para pelaku juga bisa dibentuk oleh adanya negosiasi yang terus menerus antar pelaku dalam jaringan. Berdasar dari hal tersebut, penulis menggunakan kacamata teori strukturasi Giddens serta berbekal 4 (empat) pola berjejaring menurut Diani (2003) untuk melihat dan mengamati fenomena yang terjadi dalam gerakan Gusdurian

D. Membingkai Gagasan Gus Dur sebagai Spirit Gerakan

Berbagai tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial sebenarnya juga terjadi karena adanya sistem keyakinan

yang mengalami proses generalisasi yang terdiri dari hal-hal bersifat histeria, norma, dan nilai.

Mobilisasi sumber daya sebagaimana di lakukan dalam jaringan gusdurian menunjukkan bahwa beragam tindakan partisipan dalam gerakan sosial juga menjadi efektif karena dijalankan oleh aktor gerakan sosial. Oleh karena itu mobilisasi sumber daya saja sebenarnya belum bisa optimal untuk melahirkan gerakan sosial. Sebuah gerakan sosial niscya membutuhkan pemingkaian. Hal ini penting untuk memobilisasi organisasi gerakan sosial dengan memanfaatkan sumber daya material dan non-material yang tersedia. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial justru sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya yang bisa memainkan peran penting dalam membentuk wacana yang memungkinkan seseorang untuk dapat bergabung dengan sebuah organisasi.

Terkait dengan hal ini maka untuk mengetahui pemingkaian aksi dan pola komunikasi antar komunitas Gusdurian, pemingkaian aksi kolektif adalah hal niscaya dalam gerakan. Hal ini digunakan untuk menjelaskan pola transformasi dan mobilisasi potensial kedalam mobilisasi aktual dalam menyakinkan kelompok sasaran yang beragam

sehingga mereka terdorong mendesak perubahan. Proses pembingkai aksi kolektif adalah upaya strategis secara sadar oleh kelompok atau individu untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri, yang mendorong terjadinya aksi bersama.

Dengan demikian, pembingkai aksi kolektif terkait dengan tujuan perebutan makna di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran aktor gerakan membutuhkan alat dalam menjalankan pembingkai aksi kolektif, yakni media, baik cetak, elektronik maupun ruang sosialisasi lainnya yang bisa menjadikan orang terlibat dalam gerakan tersebut.

Seorang intelektual kenamaan, Soedjatmoko (dalam Mallarangeng, 2002), menyebutkan bahwa “..setiap ide harus punya kaki..”. Hal ini tentu menunjukkan makna bahwa sehebat apapun ide seseorang, tidak akan bermanfaat banyak jika tidak ditopang dengan perangkat pendukung, seperti organisasi kerja, sumber daya manusia yang handal, modal, dan bahkan teknologi. “Kaki dari setiap ide”, tidak lain adalah hadirnya perangkat-perangkat utama yang menjalankan realisasi gagasan. Gagasan memang tidak bisa dilihat secara konkrit, namun bisa menjadi *resource* besar

dan begitu berpengaruh dalam banyak lini di ranah sosial politik bangsa. Gagasan sebagai sumber daya tentu saja tidak bisa berjalan dengan sendirinya.

Demikian pula dengan fenomena munculnya sebuah gerakan dalam masyarakat yang coba mengusung spirit yang mewujud dalam berbagai gagasan dari sosok Abdurrahman Wahid (-selanjutnya ditulis Gus Dur), yaitu gerakan Gusdurian. Gerakan Gusdurian tidak lain merupakan bentuk kaki yang mencoba menopang spirit, gagasan dan ide besar sang sosok bapak bangsa. Gerakan gusdurian sebagaimana disebutkan oleh para pendirinya sebagai gerakan kultural ini, merupakan bentuk gerakan sosial yang berusaha mentransmisikan sumber daya berupa gagasan Gus Dur melalui berbagai aktivitas pergerakannya, baik melalui aksi, media cetak, media elektronik, seminar, diskusi dan pertemuan publik lainnya, dan berkembang hingga menjadi gerakan sosial yang memiliki jaringan kuat dan solid. Memperhatikan hal-hal tersebut maka jelaslah bahwa kekuatan gerakan gusdurian juga terletak pada bagaimana ide-ide gus dur dibingkai sedemikian rupa sehingga mampu menjadi daya tarik yang terus mendapatkan sambutan para gusdurian.

Gerakan Gusdurian mulai muncul dan berkembang sejak tahun 2010, beberapa saat setelah Gus Dur berpulang. Selanjutnya dalam perkembangannya, gerakan Gusdurian dengan tetap konsisten dalam mempertahankan karakteristiknya sebagai gerakan yang mengutamakan sisi voluntarisme dan senantiasa berusaha mempertahankan sikap apolitis dari tindak politik praktis serta menjaga informalitas dari sisi pengorganisasiannya, makin solid berkat kekuatan jaringan. Dewasa ini, politik ketokohan dimana sosok atau tokoh menjadi sentral dalam isu sosial politik kembali menjadi sorotan di Indonesia. Dari sosok atau tokoh tersebut, gagasan dari tokoh tersebut menjadi hal yang begitu penting karena gagasan yang dilandasi oleh spirit dan ideologi seseoranglah yang menjadi landasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Haryatmoko, 2014).

Gus Dur sendiri adalah salah satu sosok yang dikenal luas masyarakat atas gagasan dan berbagai pemikiran besarnya. Hal itu bisa dilihat setidaknya dalam arena pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden misalnya, gagasan dari sosok Gus Dur ternyata masih “laku dijual” guna kepentingan politis para caleg maupun capres yang bertarung dalam pertarungan politis lima tahunan

tersebut.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa sosok Gus Dur hingga saat ini memang masih berpengaruh dan menjadi panutan sebagian kalangan masyarakat Indonesia, terlebih lagi warga di kalangan Nahdlatul Ulama, tempat dimana Gus Dur dibesarkan. Dengan demikian bahwa gagasan Gus Dur memang seakan ada terus menerus dan tak lekang dimakan jaman. Walaupun Gus Dur sudah meninggal, namun spirit, gagasan besar serta kebijakan politisnya yang dikenal begitu demokratis dan pro terhadap keragaman bangsa masih begitu dirindukan, khususnya saat melihat berbagai realita dimana bangsa Indonesia di berbagai segi masih memperlihatkan sisi “*out of the track*”-nya. Gagasan empat pilar kebangsaan² yang diciptakan oleh para *founding fathers* bangsa juga seakan sudah mulai luntur jika melihat tingginya intensitas aktivitas masyarakat yang kian menunjukkan sisi intolerannya. Di satu sisi, meningkatnya jumlah insiden kekerasan dan intoleransi dalam masyarakat

¹ Suara Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, yang memiliki jumlah pengikut yang cukup signifikan di Indonesia, begitu diperebutkan suaranya dalam pemilihan umum dengan menggunakan nama besar sosok Gus Dur sebagai strategi penarik suara. Selain PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang merupakan partai yang “dibesarkan” oleh Gus Dur sendiri, perebutan suara NU dengan memanfaatkan nama Gus Dur juga dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, di era Jokowi

² Empat pilar kebangsaan yang dimaksud adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dan disertai dengan penegakan hukum yang lemah, membuat masyarakat sipil perlu berjuang sendiri untuk menekan keberlanjutan fenomena yang meresahkan ini. Seiring waktu berjalan, gagasan Gus Dur kian dirindukan dan menjadi *urgent* untuk kembali diperjuangkan.

Semakin membesarnya kerinduan secara emosional akan sosok Gus Dur membuat banyak elemen dalam masyarakat merasa perlu untuk “menghidupkan kembali” spirit dan gagasan Gus Dur dalam kehidupan bermasyarakat. Berawal dari kerinduan tersebut, muncul berbagai komunitas yang bermula dari rasa rindu, *ngefans*, kagum dan mencintai sosok dan pemikiran Gus Dur. Komunitas yang mula-mula hanya ada di berbagai daerah kini mulai melakukan pergerakan meskipun masih mengalami kesulitan dalam menentukan arah dan gerakannya masih bersifat *euphoria*. Hingga pada akhirnya atas inisiatif dari murid-murid Gus Dur, perca di berbagai daerah yang merupakan berbagai komunitas yang masih terserak tersebut dijahit menggunakan benang berupa spirit Gus Dur, hingga akhirnya muncul menjadi gerakan yang berusaha “menghidupkan” kembali sosok Gus Dur di dunia. Adapun gerakan tersebut menamakan dirinya sebagai gerakan Gusdurian, sebuah gerakan yang

berusaha membangkitkan kembali sosok Gus Dur di dunia melalui upaya merawat nilai-nilai, pemikiran-pemikiran dan melanjutkan perjuangan Gus Dur di era kontemporer.

PENUTUP

Individu, kelompok dan lembaga yang terjaring dalam komunitas gusdurian merupakan komunitas masyarakat sipil yang terorganisir secara baik dan mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam menghadapi perubahan sosial pasca reformasi tahun 1998. Mereka terjaring untuk melakukan aksi gerakan baik melalui media massa dan elektronik dan aksi riil merespon problematika sosial yang berkembang. Gerakan ini dalam melakukan berbagai bentuk gerakan dilandasi oleh spirit gus Dur dengan meneladani dan melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh Gus Dur yang kemudian terangkum dalam 9 nilai dasar perjuangan Gus Dur. Gerakan ini tumbuh menjadi gerakan sosial dalam kategori gerakan sosial baru.

Sebagai gerakan sosial, jaringan gusdurian telah mealkukan serangkain upaya strategi di dalam mengemas potensi-potensinya baik secara internal maupun ekstrenal. Seacara ekstrenal gerakan gusdurian memapu menangkap dinmik politik pasca reformasi sebagai peluang. Sedangkan secara internal gerakan gusdurian mampu memobilisasi sumber dayanya baik materian maupun non materian melalui pengauatan jaringan dari pusat hingga daerah yang hingga sekarang dudah mencapai ratusan. Hal yang tidak kalah penting adalah seni gerakan gusdurian dalam membingkai isu-isu dengan magnet spirit nilai-nilai yang di ajarkan oleh Gus Dur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1987.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Kritik Wacana Agama*. Yogyakarta: LKiS, 1993. Ali Riyadi, Ahmad, *Gerakan Pembaruan Islam Kaum Muda Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia 1990-2005*. Yogyakarta: Disertasi pada UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Ali, Mochamad, "Gerakan Islam Moderat di Indonesia Kontemporer." Dalam *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, ed. Rizal Sukma dan Clara Joewono, Jakarta: CSIS, 2007.
- Ali-Fauzi, Ihsan dan Syaiful Mujani (ed.). *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Atas Perda Syariah*. Jakarta: Nalar, 2009.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Azra, Azyumardi. "Faktor Islam di Indonesia Pasca Soeharto." Dalam *Indonesia di Tengah Transisi. Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, ed. Chris Manning dan Peter Van Diemen. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Berger, Peter L. dan Thomas Lukcman. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta:

- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Budiman, Arief, dan Olle Tornquist. *Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001.
- Castles, Lance, "Pengantar". Dalam *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, ed.
- Zainal Arifin Thoaha dan M. Aman Musthofa. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Dhakidae, Daniel. "Langkah Non-Politik Dari Politik Nahdlaul Ulama." Dalam *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, ed. Ellyasa KH Dharwis. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Dhofier, Zamaksyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1990
Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Effendi, Djohan. *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Hasan, Nurhaidi Book Review : Islam Politik, Teori Gerakan social, dan Pencarian Model Kajian Islam Baru Lintas Disiplin, *Al'Jami'ah* Vol. 44 No. 1 2006, 245

- Jenkins, Craig dan William Form. "Social Movement and Social Change." Dalam *The Handbook of Political Sociology*, ed. Thomas Janoski, Robert Alford, Alexander Hicks, dan Mildred Schwartz. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Juhari, Imam Bonjol. *Gerakan Sosial Islam Lokal Madura: Studi Gerakan Protes Islam Sunni Terhadap Ideologi Syiah di Sampang*. Surabaya: Disertasi pada UIN Sunan Ampel, 2014.
- Karni, Asrori S. *Civil Society dan Ummah. Sintesa Rumah Demokrasi*. Jakarta: Logos, 1999.
- Locher, David A. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall, 2002. LP3ES, 1990.
- Mahfud MD. *Islam, Politik, dan Kebangsaan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khitah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Mubarak, M. Zaki. *Geneologi Islam Radikal di Indonesia. Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Reorientasi Pembaharuan Islam. Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme: Paradigma Baru Islam Indonesia*. Jakarta: LSAF, 2010.

- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- John Markoff. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, terj. Ari Setyaningrum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Raharjo, M. Dawam. "Krisis Peradaban Islam." Dalam *Bayang-bayang Fanatisme. Esai-esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid*. Jakarta: PSIK, 2007.
- Raharjo, Mudjia. *Sosiologi Pedesaan: Studi Perubahan Sosial*. Malang: UIN Malang Press, 2001.
- Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia: Islam, Democracy, and The Ideology of Tolerance*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Ridwan, Nur Khalik. *Santri Baru, Pemetaan Wacana Ideologi dan Kritik* Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2004.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: dari osiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Robert H, Laurer. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka, 2001.
- Rubin, L. Bush. "Wacana Perempuan di Lingkungan NU: Sebuah Perdebatan Mencari Bentuk." Dalam *Jurnal Tashawirul Afkar*,
- Rumadi, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam KUHP*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.